



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya LAKIP dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kami serta informasi yang disajikan, Olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).



Kepala Badan kesbangpol

Hj. Asliah Rahim, S.Sos.,M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel, Bagan, Chart dan Ganbar.....	iii
BABI. I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan.....	2
3. Dasar Hukum.....	3
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	4
1. Kedudukan OPD.....	4
C. Isu Strategis Organisasi	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	19
A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.....	19
B. Akuntabilitas Keuangan	65
BAB IV. PENUTUP.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	

DAFTAR BAGAN, TABEL, CHART DAN GAMBAR

Bagan	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024	14
Tabel 2.2	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2024	18
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	20
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024	21
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024	29
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024	24
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024	45
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024	52
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2024	59
Tabel 3.8	Jenis Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Langsung	64
Chart 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir).	24
Chart 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir).	32
Chart 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir).	40
Chart 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir).	48
Chart 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir).	55
Chart 3.6	Perkembangan Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2023	60
Chart 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024	66
Gbr 3.1	Kegiatan Paskibraka 2024	28
Gbr 3.2	Kegiatan Netralitas ASN	35

Gbr	3.3	Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah	43
Gbr	3.4	Kegiatan Monev ormas	51
Gbr	3.5	Kegiatan Diseminasi Moderasi Beragama dan Monev ketahanan keluarga Anti Narkoba	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

1. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Melalui SAKIP ini, disusun perencanaan kinerja yang focus pada permasalahan utama pemerintahan atau organisasi serta berorientasi pada perbaikan pencapaian sasaran kinerja yang terukur. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya diukur pencapaiannya secara berkala serta

mengidentifikasi permasalahan dan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diupayakan untuk memastikan tercapainya sasaran. Pada setiap tahun kinerja berakhir, maka entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan diikuti dengan review dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya.

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini, sebagai berikut :

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini, sebagai berikut :



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

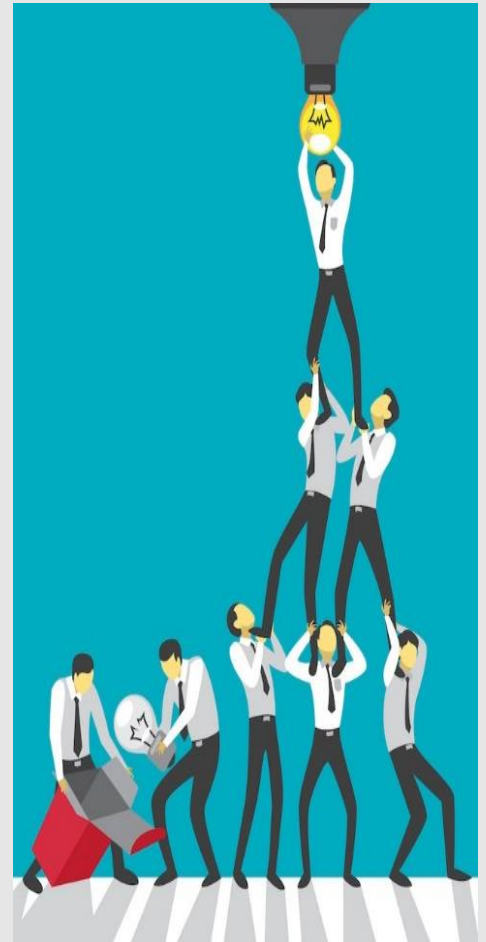


Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan OPD

Berdasarkan struktur Kepegawaian OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Unsur Penujang Pemerintahan memiliki susunan organisasi yang terjabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Pasal 9 Ayat (3) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Pada Bab XXIX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Paragraf 1 kedudukan dan Paragraf 2 Tugas dan Fungsi, dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut :



- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di Bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait. Susunan Organisasi Sekretariat Sebagaiman dimaksud dalam

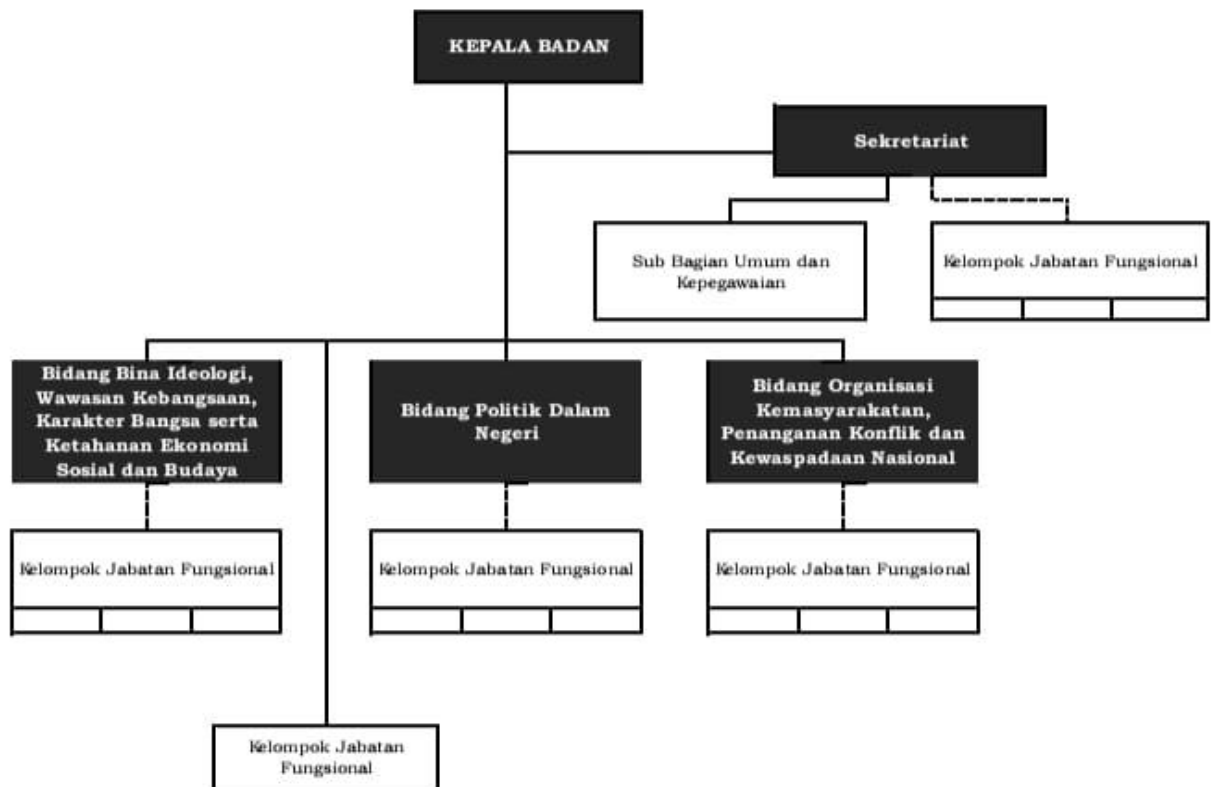
Pasal 426, terdiri atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas Sub Bagian, sebagai berikut :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, Karakter bangsa serta Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Susunan Organisasi Bidang Ideologi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri. Susunan Organisasi Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan , Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Susunan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

XXVIII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

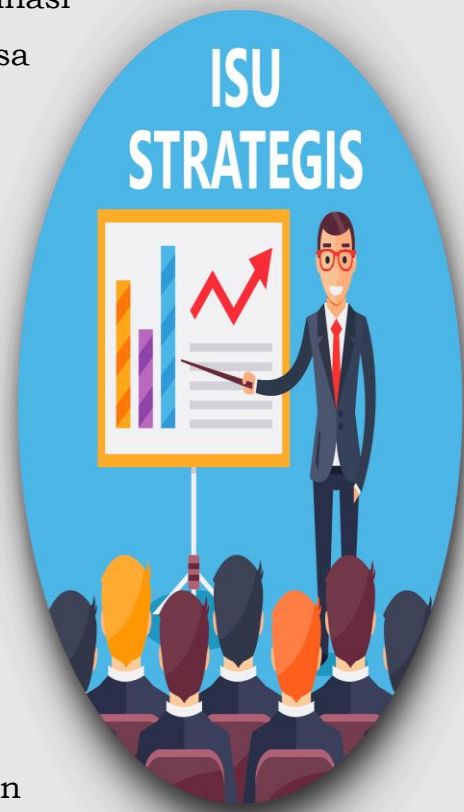
Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Terkait dengan Tugas dan Fungsinya

C. Isu Strategis Organisasi

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah memiliki fungsi antara lain Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan pembinaan kesatuan bangsa serta Peningkatan stabilitas keamanan dan Perkembangan Politik dalam negeri. Sesuai dengan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan upaya melalui penetapan program kerja berupa Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. pengembangan wawasan kebangsaan dilakukan upaya antara lain memberikan pemahaman wawasan kebangsaan berupa penguatan empat pilar kebangsaan kepada generasi muda dan masyarakat, Dalam bidang pendidikan politik dilakukan upaya antara lain Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Di daerah, serta Kegiatan fasilitasi verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Sosialisasi pendidikan politik di sekolah yang ada di kabupaten polewali mandar.



Untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

maka dilakukan upaya antara lain penyelenggaraan Kewaspadaan Dini melalui Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberadaan ormas dan melakukan tertib administrasi ormas dan adanya ormas yang mendapatkan bantuan hibah ormas dalam rangka mendukung kinerja ormas Untuk pengembangan Ketahanan ekonomi sosial dan budaya dilakukan upaya antara lain kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, kegiatan penyelenggaraan rakor pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan, dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) untuk menyelaraskan pemahaman mengenai obat-obtan terlarang dan cara mencegahnya

Upaya-upaya sebagaimana di atas telah membantu menciptakan situasi kondusif dalam kehidupan masyarakat Kab.Polewali Mandar.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sejalan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang maka berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya serta keamanan senantiasa dapat terjadi. Oleh karena itu faktor-faktor berupa infrastruktur jalan yang kurang baik terutama di daerah pelosok, sarana mobilitas Badan yang belum memadai hingga kualitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih kurang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor.

Faktor-faktor sebagaimana di atas berpengaruh besar terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar yang harus bekerja secara offensive bukan lagi deffensive dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang terus menerus harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan di masyarakat

- **Tantangan dan Peluang**

Stabilitas keamanan, ekonomi sosial dan budaya serta politik yang tetap terjaga merupakan prasyarat untuk dapat dilaksanakannya pembangunan. Hal ini merupakan tantangan yang perlu diupayakan terus menerus tercipta di tengah masyarakat. dengan demikian hal-hal seperti aturan/nilai-nilai budaya yang hidup/mengikat masyarakat, kemajuan teknologi informasi, pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama, berkembangnya perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan dan sebagainya merupakan entitas yang perlu dikelola sebagai peluang dalam mendukung kelancaraan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Identifikasi permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah :

- a. Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;

2. Toleransi :

- a. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat terutama akibat penurunan tingkat ekonomi disebabkan adanya kenaikan inflasi;
- b. Masih tingginya penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu;
- c. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budi luhur, budi pekerti dan etika budaya bangsa yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi,

penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.

3. Demokrasi :

- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
- b. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pilkada dan pilkades.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

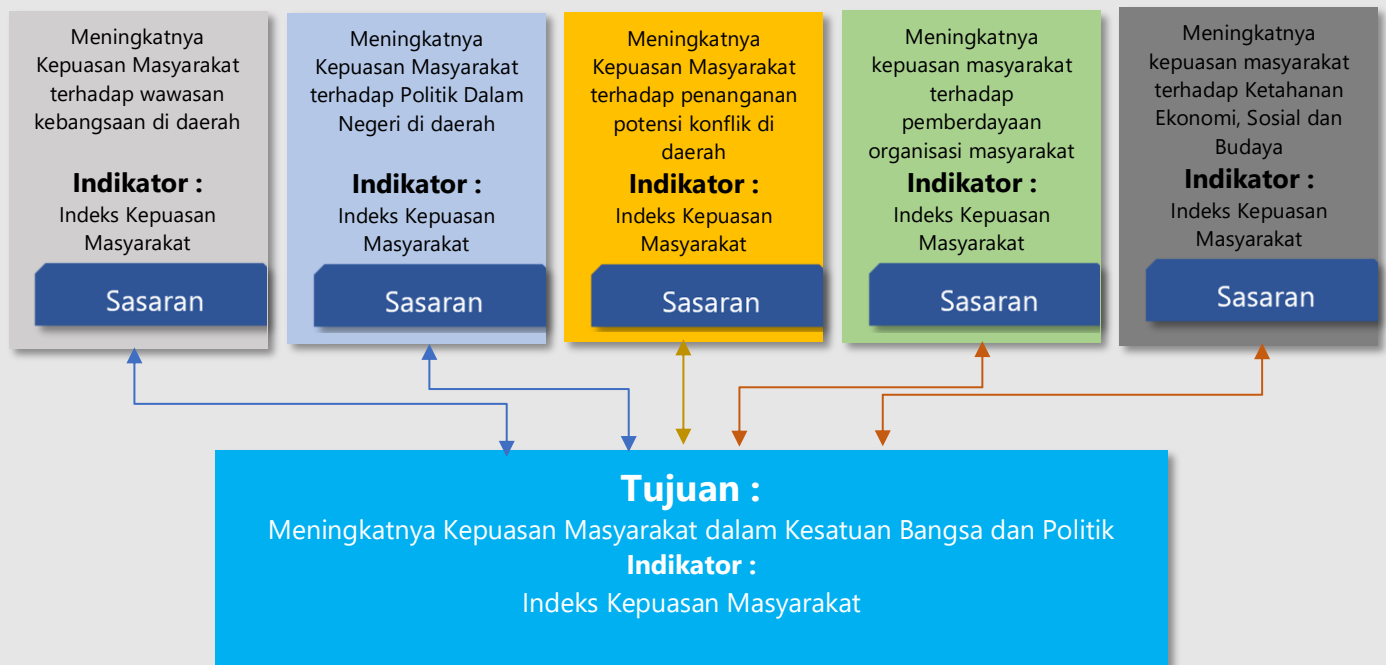
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arah kebijakan strategis pembangunan 2019-2024, sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Berdasarkan hasil pelaksanaan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.

Selain itu, pada tahun 2016 terdapat perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di daerah, sehingga dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut melalui perubahan struktur kelembagaan di Kabupaten Polewali.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019- 2024, dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Tahun 2019-2024



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *countinously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

	Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	A	A
			Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	93.33%	95.56%	93.33%	95.56%	97.78%	100%
			Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

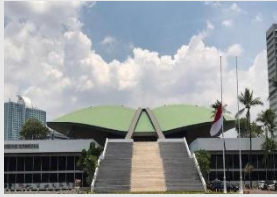
Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Wawasan kebangsaan di daerah

Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat
Target :
Sangat Baik



Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat
Target :
Sangat Baik



Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah

Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat
Target :
Sangat Baik



Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Organisasi Masyarakat

Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat
Target :
Sangat Baik



Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat
Target :
Sangat Baik



Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator :
 Predikat SAKIP perangkat daerah
Target : A
 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah
Target : 100%
 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah
Target : Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 814.304.870,-
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp.54.468.074.754,-
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 65.633.943,-
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 21.582.153,-
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 23.682.157,-
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.2.065.669.966,-
J u m l a h		Rp.57.458.947.843,-



C. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2024

Penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas menjadi suatu tuntutan utama. Dalam Upaya meningkatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengaplikasikan instrument layanan berbasis elektronik, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas keterbukaan informasi public, mengaplikasikan PPID, Website terintegrasi dan aplikasi Laporan dan Media social.
2. Peningkatan kualitas data sektoral didukung layanan data setoral, data makro melalui aplikasi Polman Satu Data terkait data Ormas, Partai Politik, penanganan konflik, rekomendasi penelitian dan lainnya
3. Predikat SAKIP Perangkat Daerah didukung melalui layanan e-SAKIP terintegrasi, peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan dan asset didukung ketersediaan aplikasi Simda BMD, SIPD Perencanaan dan Penganggaran, serta Peningkatan indeks kepuasan Masyarakat/stakeholder didukung melalui ketersediaan aplikasi e-Survey layanan,
4. Aplikasi SIORMAS Kemendagri dalam hal mendukung pelayanan pembuatan SKT ormas



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya,

dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2019-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>85 – 100%	Sangat Baik
2	>70 – 85 %	Baik
3	>60 – 70 %	Cukup
4	>50 – 60%	Kurang
5	50 %	Sangat Kurang

Dalam mengukur tingkat persentase Capaian Kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi maka pencapaian kinerja semakin baik :

$$\text{Persentase pencapaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi semakin rendah pencapaian kinerja :

$$\text{Persentase pencapaian : } \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

**Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
Wawasan Kebangsaan di Daerah**



Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

Target :

Sangat Baik (>85 – 100%)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran strategis I digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (100)	100 %

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis I, predikat indeks kepuasan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2024, yaitu dari target sangat baik (85-100%) terealisasi sangat baik (100,00%).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, mengisyaratkan pentingnya mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada :

- a. Organisasi politik
- b. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga nirlaba lainnya
- c. Pegawai negeri sipil
- d. Guru / penyidik; dan
- e. Tokoh agama/masyarakat/adat
- f. Pemuda dan Pelajar

Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan :

- a. Pembangunan karakter bangsa
- b. Pelibatan Kerjasama multipihak
- c. Keterbukaan
- d. Kreatifitas
- e. Integritas antara ucapan, pikiran dan Tindakan; dan
- f. Penggalian dan penggunaan muatan local

Dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang pedoman Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tujuan Penyelenggaraan dan pembinaan Kepada Generasi Muda Tentang Pemahaman Nilai-nilai Luhur Pancasila dan Ideologi Negara serta Wawasan Kebangsaan yang berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila yang dilambangkan dalam kendit bertuliskan Pandu Ibu Indonesia Berpancasilla

Maka predikat indeks kepuasan Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- nilai 85-100 : sangat baik
- nilai lebih dari 70-84 : baik
- nilai 60-70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

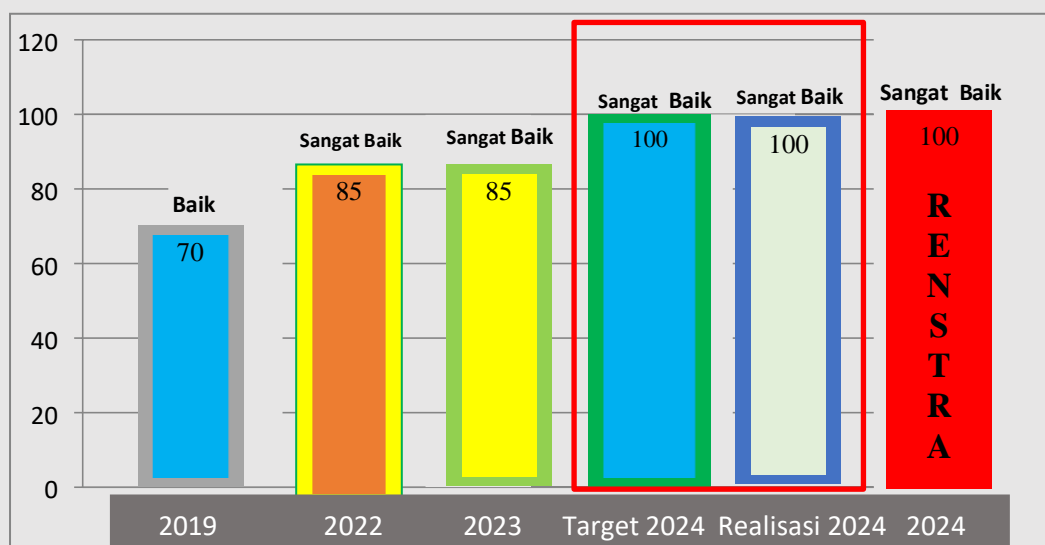
Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran I untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemahaman wawasan kebangsaan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan adalah target sasaran sesuai pedoman penyelenggaraan wawasan kebangsaan dengan melibatkan unsur Pelajar di Kabupaten Polewali Mandar dalam kegiatan yang telah dilakukan Jumlah Peserta 75 orang Untuk Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan masuk kategori baik (85-100) dari target 75 orang terealisasi 100 %. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah Institusi/sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan berupa pembentukan kader paskibraka sebagai calon-calon duta, adapun peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Polewali Mandar dalam mendukung penyelenggaraan wawasan kebangsaan sebagai berikut :

No.	Nama Institusi/Sekolah	Jumlah
1	SMAN 1 Polewali	23
2	SMAN 2 Polewali	5
3	SMAN 3 Polewali	14
4	SMKN 1 Polewali	5
5	SMAN Matakali	1
6	SMAN 1 Wonomulyo	5
7	SMAS YPPP Wonomulyo	1
8	SMKS YPPP Wonomulyo	1
9	MAN 1 Polman	8
10	SMKN Luyo	1

11	SMAN 1 Campalagian	3
12	SMKN Campalagian	1
13	SMKN Labuang	1
14	SMAN 1 Tinambung	4
15	SMK Limboro	1
16	SMAN 1 Alu	1
JUMLAH		75 orang

PREDIKAT : SANGAT BAIK

Chart 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024
Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Bidang Bina Ideologi Wasbang, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekosbud , Januari 2024

**Capaian Kinerja
dasar target 2024**

= $\frac{100,00}{100,00}$ 100 %

**Capaian Kinerja
dasar 2019-2024,
Meningkat :**

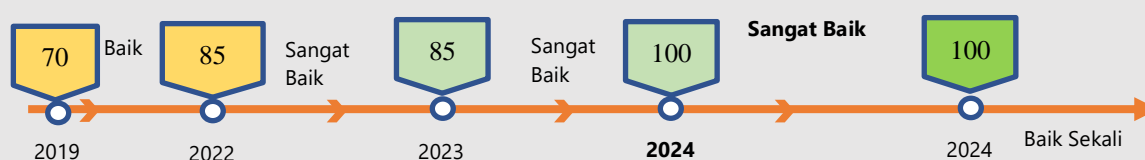
30,00%

**Capaian Kinerja
target Akhir Renstra**

= $\frac{100,00}{100,00}$ 100 %

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemahaman Wawasan kebangsaan Masyarakat (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemahaman Wawasan kebangsaan Masyarakat tahun 2022 dan 2023 Sudah Meningkat level Sangat baik (85%). Capaian ini dipengaruhi peningkatan pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan dengan adanya sosialisasi kepada target 2023 yaitu kelompok Lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa dan Jurnalis. sehingga target dan realisasi untuk tahun 2024 sudah di perluas dari indikator penyelenggaraan wawasan kebangsaan ke kelompok Pelajar dalam Bentuk pembinaan Nilai-nilai Pancasila Kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Penyelenggaraan Pemahaman wawasan kebangsaan dan Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah
- Adanya Regulasi Terkait Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang lebih menekankan pembinaan ideologi pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan

Faktor Penghambat :

- Belum terbentuk nya Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagaimana amanat permendagri 71 tahun 2012 di Polewali Mandar
- Kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat dalam hal pemahaman wawasan kebangsaan yang mencakup empat pilar kebangsaan disebabkan setiap tahun terbatas jumlah peserta yang disasar dan bahkan tahun 2024 tidak dilaksanakan akibat refocusing anggaran
- Kegiatan Tahun ini sebatas pembentukan paskibraka, seharusnya dalam mendukung Pemahaman wawasan kebangsaan perlu juga dilakukan dialog empat pilar kebangsaan kepada kelompok masyarakat

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Intens berkomunikasi dengan anggota MPR RI Dapil Sulbar terkait tugas nya dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan didaerah untuk senantiasa Bersama dengan jajaran kesbangpol
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarluaskan informasi terkait empat pilar kebangsaan
- Segera membentuk Pokja PPWK melalui Keputusan Bupati untuk melakukan upaya percepatan penyebarluasan Pendidikan wawasan kebangsaan.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan didaerah sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 818.000.555,-	Rp. 818.000.555,-	0
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikatan Sejarah Kebangsaan	Rp. 0 ,-	Rp. 0,-	0
Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Rp. 818.000.555 ,-	Rp. 818.000.555,-	100

Gambar 3.1. Kegiatan Paskibraka 2024

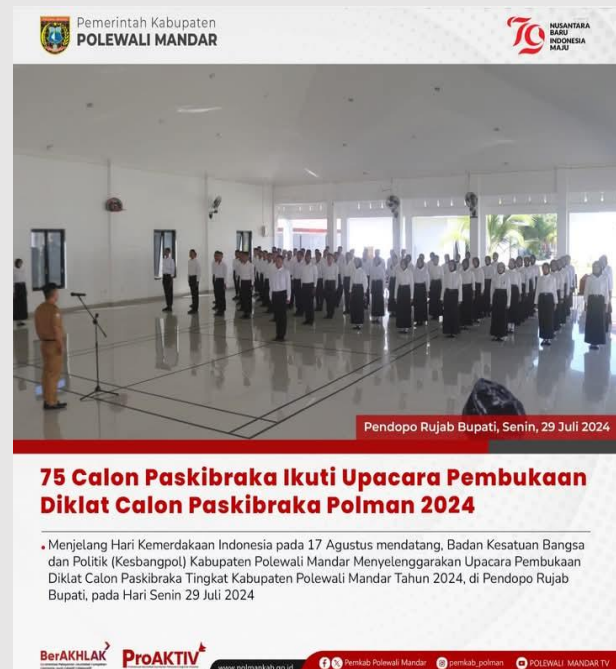


Foto bersama Forkopimda
Usai Pelaksanaan
Upacara Pengibaran
Bendera HUT RI ke 79

Foto bersama Forkopimda
Usai Pelaksanaan
Upacara Penurunan
Bendera HUT RI Ke 79



**Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran strategis II digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Politik dalam negeri di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	Baik (100)	100 %

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis II, predikat indeks kepuasan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2024, yaitu dari target sangat baik (85-100%) terealisasi sangat baik (100,00%).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan politik , mengisyaratkan pentingnya mengoptimalkan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik dan memberikan kemudahan bagi partai politik, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan Lembaga atau instansi vertical di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan Pendidikan politik di daerah

Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan antara lain :

- a. Seminar dan lokakarya

- b. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan
- c. Asistensi , pelatihan dan bimbingan teknis
- d. Pagelaran seni dan budaya
- e. Jambore, perkemahan dan napak tilas dan;
- f. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya ilmiah, film documenter, dan cipta lagu.

Kelompok sasaran terkait fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik meliputi :

- a. Partai politik
- b. Organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
- c. Lembaga nirlaba lainnya
- d. Lembaga atau instansi vertikal di daerah

Materi atau muatan dalam fasilitasi Pendidikan politik baik wajib dan pilihan sebagai berikut :

- a. Pacasila
- b. UUD 1945
- c. Demokrasi
- d. Hak asasi manusia
- e. System pemerintahan
- f. Budaya dan etika politik
- g. Pendidikan kewarganegaraan
- h. Dll.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran II untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah yang meliputi :

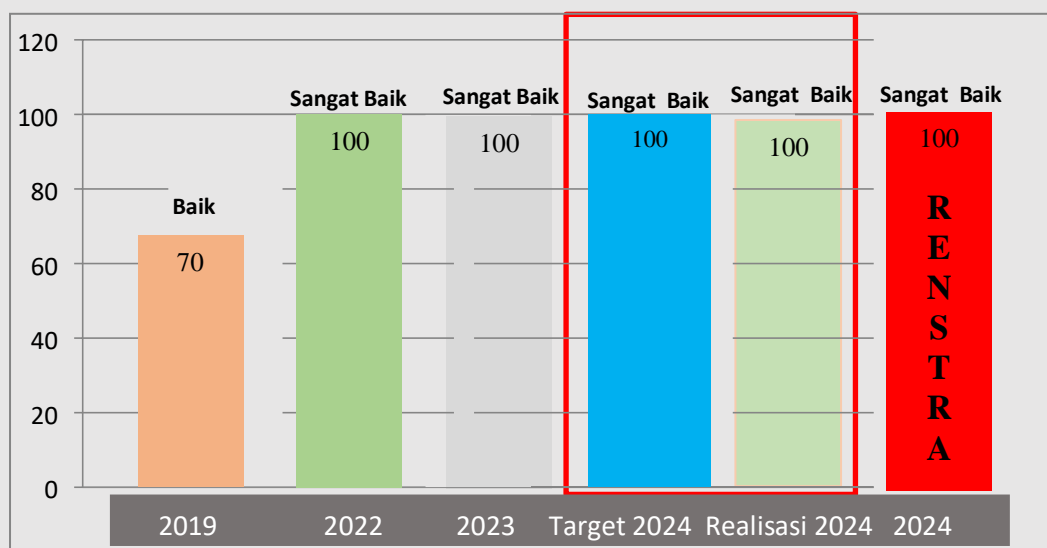
1. kegiatan sosialisasi Netralitas ASN Menjelang Pemilu 2024 adalah target sasaran sesuai pedoman fasilitasi Pendidikan politik dengan melibatkan unsur Pendidik Di Tingkat sekolah Dasar di Kecamatan Polewali Jumlah Peserta 100 orang untuk Pendidikan politik dan masuk kategori baik sekali (85-100) dari target 35 orang terealisasi 100 %. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah Institusi yang berpartisipasi dalam kegiatan Pendidikan politik dengan jumlah institusi yang ditargetkan dalam mendukung pemahaman politik di masyarakat,
2. Sosialisasi Netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 dilaksanakan di 5 (lima) Zona yang sasarannya adalah Aparat Kecamatan, Desa Kelurahan serta Puskesmas dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Adapun pembagian Zona Sosialisasi Netralitas ASN sebagai Berikut :

No.	Zona	Kecamatan	Tempat Pelaksanaan
1.	I	<ul style="list-style-type: none"> • Polewali • Binuang • Anreapi • Matakali 	Ruang Pola Kantor Bupati
2.	II	<ul style="list-style-type: none"> • Wonomulyo • Tapango • Mapilli • Campalagian 	Aula Akper YPPP Wonomulyo
3.	III	<ul style="list-style-type: none"> • Tinambung • Balanipa 	Taman Budaya Buttu Ciping

		<ul style="list-style-type: none"> • Limboro • Alu • Campalagian 	Tinambung
4.	IV	<ul style="list-style-type: none"> • Luyo • Tutar 	Kantor Camat Luyo
5.	V	<ul style="list-style-type: none"> • Bulo • Matangnga 	Kantor Camat Bulo

PREDIKAT : SANGAT BAIK

Chart 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Politik Dalam Negeri di Daerah
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024
Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Bidang Politik Dalam Negeri , Januari 2024

**Capaian Kinerja
dasar target 2024**

$$= \frac{100,00}{100,00} \text{ 100 \%}$$

**Capaian Kinerja
dasar 2019-2024,
Meningkat :**

30,00%

**Capaian Kinerja
target Akhir Renstra**

$$= \frac{100,00}{100,00} \text{ 100 \%}$$

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap politik dalam negeri (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah tahun 2022 dan 2023 Sudah berada (100%). Hal ini semakin aktif dan massif dilakukan sosialisasi menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Politik dalam negeri berupa Pendidikan politik mengalami peningkatan pada tahun 2024 (100,00 %). Capaian ini dipengaruhi peningkatan pemahaman masyarakat akan Pendidikan politik berupa Sosialisasi Netralitas ASN dengan adanya sosialisasi kepada target Sudah Maksimal dengan Menyasar Kelompok Tenaga Pendidik, Aparat Desa dan kelurahan Serta Tenaga Kesehatan .

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Pedoman Pendidikan Politik
- Telah melibatkan Unsur Partai Politik serta Tenaga Pendidik, Lurah dan Kepala Desa Serta tenaga Kesehatan dalam Proses Pendidikan Politik.

Faktor Penghambat :

- Belum Optimalnya Sosialisasi Disebabkan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada pemilu 2024 dan Pilkada Mengalami Penurunan
- Masih Minimnya Anggaran Pendidikan Politik Pada badan kesbangpol sehingga belum maksimal dilaksanakan

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Mengupayakan lebih intens berkomunikasi dengan partai politik supaya senantiasa dilibatkan dalam proses Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sehingga informasi dari pemerintah lebih terarah dalam pemahaman politik dimasyarakat
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah dalam mensosialisasikan Pendidikan politik
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarluaskan informasi terkait Pendidikan politik kepada masyarakat

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Rp. 59.013.769.390,-	Rp. 58.508.920.471,-	99.14
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Rp. 974.647.775,-	Rp. 470.100.677,-	48.23

Daerah			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	RP. 58.020.924.949,-	RP. 58.020.808.868,-	99.99
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Rp. 18.196.666,-	Rp. 18.010.926,-	98.97

Gambar 3.2. Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN dan Pendidikan Politik



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. POLEWALI MANDAR**



Senin, 15 Juli 2024

APEL PELAYANAN PUBLIK

Apel Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Menyuksesan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dan Penandatanganan Siap Mendukung dan Menyuksesan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Pj. Bupati Polewali Mandar, Plh Sekretaris Daerah dan seluruh Pejabat Eselon I, II, III, IV dan peserta Apel. Yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Polewali Mandar

ProAKTIV

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR HUMAS POLMAN PROKOPIM

Pemkab Polewali Mandar **Berita Hari Ini**



KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Barahima Hadiri Koordinasi dan Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pilkada Polewali Mandar 2024 yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Dandim 1402 Polewali Mandar, Pj. Sekretaris Daerah, KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar dan Para ASN dari Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi dan Matakali dalam Penyampaian Bapak Pj. Bupati Menyampaikan bahwa setiap Pegawai ASN harus Netral dalam Pilgub dan Pilguk tidak berpijak dari segala bentuk pengaruh mangrup dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara. Di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar Hari Senin 30 September 2024

www.prokopi.polmankab.go.id

PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR HUMAS POLMAN PROKOPIM

Pemkab Polewali Mandar **Berita Hari Ini**



HARI KEDUA KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Barahima Membuka Sekaligus Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Sukses Pilkada Serentak 2024. Yang dihadiri oleh Dandim 1402 Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Ketua KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar, Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Wonomulyo, Tapango, Mapili dan Campalagian di Aula Hasan Sulur SMK YPP Wonomulyo. Kemudian dilanjutkan membuka kegiatan yang sama di Rumah Adat Buttu Ciping Yang Di hadiri Oleh Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Balaripa, Tinambung, Limboro dan Alu Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024

www.prokopi.polmankab.go.id

PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR HUMAS POLMAN PROKOPIM

Pemkab Polewali Mandar **Berita Hari Ini**



HARI KEDUA KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Barahima Membuka Sekaligus Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Sukses Pilkada Serentak 2024. Yang dihadiri oleh Dandim 1402 Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Ketua KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar, Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Wonomulyo, Tapango, Mapili dan Campalagian di Aula Hasan Sulur SMK YPP Wonomulyo. Kemudian dilanjutkan membuka kegiatan yang sama di Rumah Adat Buttu Ciping Yang Di hadiri Oleh Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Balaripa, Tinambung, Limboro dan Alu Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024

www.prokopi.polmankab.go.id

PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR HUMAS POLMAN PROKOPIM

Pemkab Polewali Mandar **Berita Hari Ini**



HARI KETIGA KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Barahima Membuka Sekaligus Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Sukses Pilkada Serentak 2024. Yang dihadiri oleh Dandim 1402 Polewali Mandar, Polres Polewali Mandar, Ketua KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar, Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Luyo dan Tutor di Aula Kecamatan Luyo. Dengan Tema "Netralitas ASN Dalam Mendukung Pilkada Aman, Damai dan Berintegritas" Hari Rabu 2 Oktober 2024

www.prokopi.polmankab.go.id

PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR HUMAS POLMAN PROKOPIM

Pemkab Polewali Mandar **Berita Hari Ini**



HARI KETIGA KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Barahima Membuka Sekaligus Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Sukses Pilkada Serentak 2024. Yang dihadiri oleh Dandim 1402 Polewali Mandar, Polres Polewali Mandar, Ketua KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar, Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Luyo dan Tutor di Aula Kecamatan Luyo. Dengan Tema "Netralitas ASN Dalam Mendukung Pilkada Aman, Damai dan Berintegritas" Hari Rabu 2 Oktober 2024

www.prokopi.polmankab.go.id

PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Target : Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran Strategis 3, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	100.00%	100.00%

Dalam rangka melakukan Kewaspadaan dini di daerah sangat penting dilaksanakan dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas di daerah sesuai amanat Permendagri nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah sebagaimana pasal 10 ayat 2 dibentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kabupaten/kota mempunyai tugas :

- Merencanakan melaksanakan dan merusmuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di kabupaten/kota.
- Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai poternsi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG didaerah.
- Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim keewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi,

gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan

- d) Memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian Dini dan Pencegahan dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran III untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap penanganan poternsi konflik di daerah yang meliputi :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah di bentuk untuk melakukan kegiatan cegah dini dan deteksi dini terhadap segala potensi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah baik dari potensi, gejala yang ditimbulkan terkait Ancaman, tantangan d hambatan dan gangguan yang terjadi di masyarakat. Potensi konflik sepanjang tahun 2024 yang ditemukan oleh Tim TKDD sebanyak 28 potensi konflik. Potensi konflik terkait Bidang Ekonomi, Sosial Budaya berdasarkan unjuk rasa dikabupaten polewali mandar menurut kelompok pelaku yang berpotensi konflik sosial. Dari hasil deteksi dini dan cegah dini dianggap berpotensi terjadinya konflik dan berhasil ditangani sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan sehingga tidak berdampak signifikan dalam mengganggu stabilitas keamanan di daerah, sehingg realisasi potensi konflik yang tertangani sebanyak 28 potensi konflik dibagi jumlah potensi konflik sepanjang tahun 2024 dapat direalisasikan kategori sangat baik dengan persentase 100 %.

Dalam rangka mendukung indikator kinerja penanganan potensi konflik di daerah sepanjang tahun 2024 didapat Frekuensi unjuk rasa di Kabupaten Polewali Mandar menurut kelompok pelaku yang berpotensi konflik sosial sabagi berikut :

No	Kelompok Massa				2024
1	Guru				-
2	Mahasiswa				11
3	Buruh				-
4	Masyarakat				3
5	Warga Desa				1
6	Ormas / Parpol				13
	Jumlah				28

Frekuensi unjuk rasa di Kabupaten Polewali Mandar menurut tuntutan

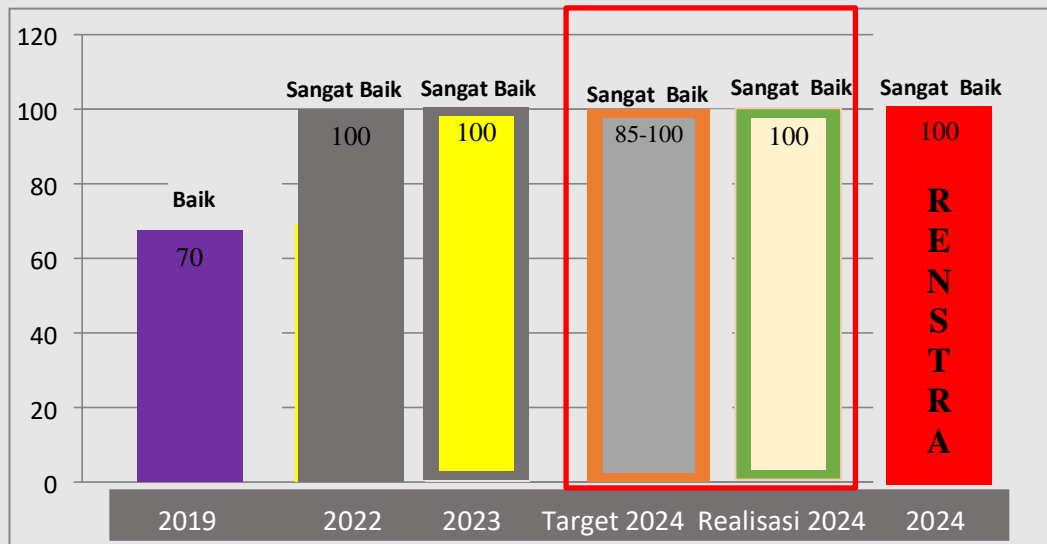
No	Tuntutan				2023
1	Ideologi				-
2	Politik				13
3	Ekonomi				1
4	Sosbud				12
5	Hukum dan Ham				-
6	Pendidikan				1
7	Kesehatan				1
	Jumlah				28

Disamping laporan potensi konflik diatas telah terjadi juga laporan konflik yang terjadi sepanjang Tahun 2024 sebagai berikut :

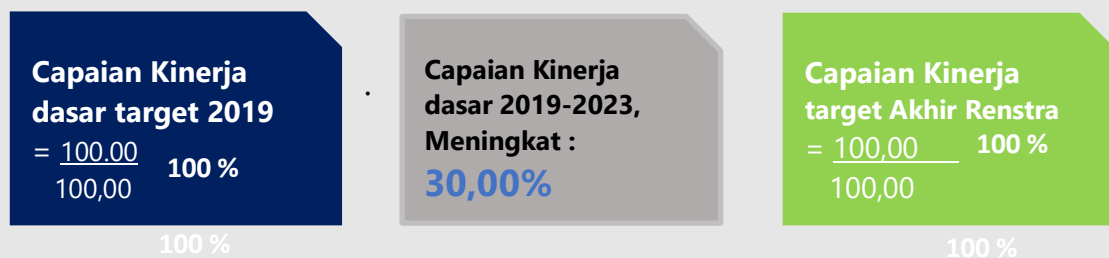
No	Jenis Konflik				2024
1	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)				1
2	Kekerasan dalam Penegakan Hukum				-
3	Konflik Identitas				-
4	Konflik Main Hakim Sendiri				1
5	Konflik Pemilihan dan Jabatan				-
6	Konflik Separatisme				-
7	Konflik Sumber Daya				1
8	Konflik Tata Kelola Pemerintahan				-
9	Konflik Tawuran antar Kelompok				-
	Jumlah				3

PREDIKAT : SANGAT BAIK

Chart 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024
Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional , Januari 2024



Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan potensi konflik di daerah tahun 2022 berada di level 100 % dibanding tahun 2019 mencapai (70 %). Serta Potensi Konflik pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 hal ini disebabkan pada tahun 2024 adalah tahun politik yaitu Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Dengan adanya regulasi tersebut telah melibatkan unsur intelijen dari Kodim, Polres, BIN, Bais dalam mendukung tugas Pemerintah daerah dalam melakukan cegah dini dan deteksi dini dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di daerah

Faktor Penghambat :

- Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas TKDD dalam mendeteksi potensi konflik baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum memadai.
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Mengupayakan lebih intens berkomunikasi dengan instansi vertikal terkait ke intelijen dalam rangka mendukung tugas pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka cegah dini dan deteksi dini
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarluaskan informasi terkait Pendidikan politik kepada masyarakat.
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan Kewaspadaan Dini dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 48.080.250,-	Rp. 48.075.250,-	99,99
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Rp. 48.080.250,-	Rp. 48.075.250,-	99,99

Gambar 3.4 : Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah



Foto Aksi Unjuk Rasa





Foto Rapat Tim
Kewaspadaan Dini Daerah



**Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pemberdayaan Organisasi Masyarakat**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	76,92 %	76,92 %

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan disamping sebagai wahana berkumpul bagi anggota juga harus senantiasa membawa kiprahnya ditengah-tengah pergaulan umat manusia yang nyata-nyata dirasakan manfaatnya. Untuk itu kehadirannya sangat strategi dalam mendorong pembangunan di wilayahnya untuk bersama-sama membangun kehidupan yang kokoh, meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemartabatan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi dan akses-akses lainnya. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 yang merupakan mitra Pemerintah .

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar secara terus menerus melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya, sesuai

dengan amanat undang-undang tersebut. Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023. Hal ini dilakukan dengan maksud agar memberikan gambaran atau kondisi tentang keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Polewali Mandar, setelah dilakukannya beberapa kali pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut sepanjang Tahun 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kajian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pencapaian yang diinginkan, mengidentifikasi masalah yang timbul terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, melakukan penilaian apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol sudah tepat dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Ormas, dan mengidentifikasi kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran Progres, serta memberi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran IV untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang meliputi :

1. Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh tim terpadu organisasi kemasyarakatan yang

untuk tahun 2024 ini yang ditargetkan sebanyak 100 ormas dari 130 ormas yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar dengan persentase capaian 76,92 % dari jumlah Ormas yang terdaftar kegiatan monitoring dan evaluasi Organisasi Kemasyarakatan Telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan untuk Tahun 2024 kembali dilaksanakan akan tetapi akibat adanya refocusing anggaran sehingga target yang dicapai pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 85,96 % di Tahun 2023 Menjadi 76,92 % di tahun 2024 atau terjadi penurunan sekitar 9,04 %

**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang terdaftar
di Badan Kesbangpol sampai dengan Tahun 2024**

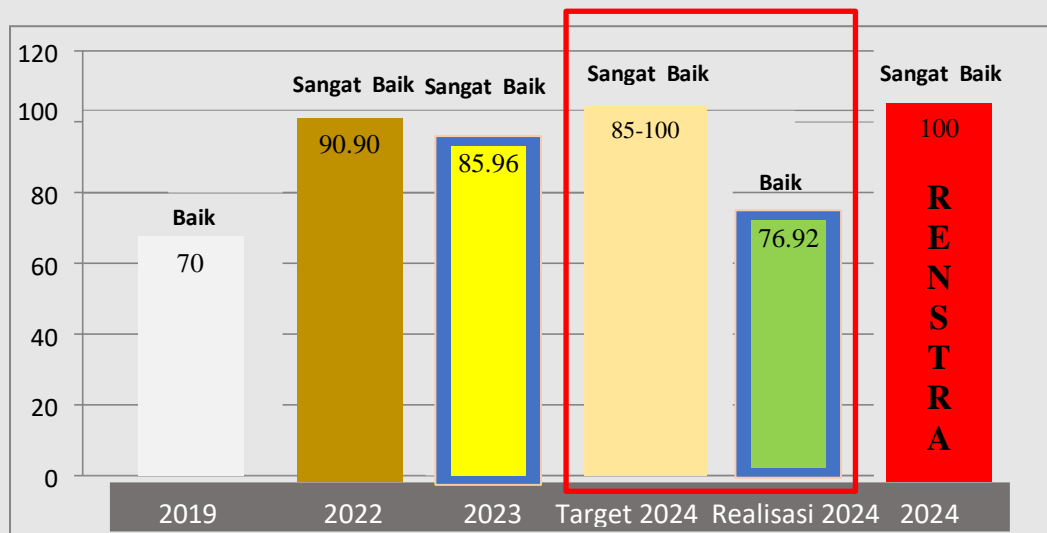
No.	Jenis ormas	Jumlah
1	Ormas Kepemudaan	7
2	LSM	45
3	BKM	7
4	Yayasan	32
5	Ormas Lainnya	39
	JUMLAH	130

**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang di Monev
Pada Tahun 2024**

No.	Jenis ormas	Jumlah
1	Ormas Kepemudaan	7
2	LSM	30
3	BKM	6
4	Yayasan	25
5	Ormas Lainnya	32
	JUMLAH	100

PREDIKAT : SANGAT BAIK

Chart 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024
Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional , Januari 2024

Capaian Kinerja
dasar target 2024

$$= \frac{76,92}{100,00} \quad 76,92$$

Capaian Kinerja
dasar 2019-2024,
Meningkat :

6,92%

Capaian Kinerja
target Akhir Renstra

$$= \frac{76,92}{100,00} \quad 76,92$$

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 76,92 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 6,92 % dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2023 berada di level yang mencapai (85,96 %). Capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,04 % di banding tahun 2023 disebabkan pemberdayaan dan monitoring dan evaluasi ormas hanya di fokuskan target yang di rencanakan 2024 disebabkan pagu anggaran 2024 ini mengalami penurunan dibanding anggaran tahun

2023, Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini di 2024 sudah mencapai 76,92 %.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- Dengan adanya regulasi tersebut telah melibatkan unsur intelijen dari Kodim, Polres, BIN, Bais dan Kementerian Agama dalam mendukung tugas Pemerintah daerah dalam melakukan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan keberadaan Ormas

Faktor Penghambat :

- Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu Ormas dalam melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan ormas.
- Sekretariat Ormas Sudah ada yang tidak sesuai dengan yang ada didaftar sehingga menyulitkan tim dalam melakukan monev
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol senantiasa mengajak ormas untuk melakukan dialog dalam menyikapi persoalan di daerah untuk senantiasa memberikan sumbangsih dan pemikiran untuk kemajuan daerah
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka untuk melakukan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan pemberdayaan ormas.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 9.957.283,-	Rp. 9.882.153,-	99,25
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Rp. 9.957.283,-	Rp. 9.957.283,-	99,25

Gambar 3.5. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Ormas Tahun 2024



Monev Ormas Garda
Bela Negara Nasional

Monev Ormas
Relawan Ratu Prabu



Monev Ormas Pusat
Kajian Islam Inklusif



**Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran Strategis 5, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	100.00%	100.00%

Dalam mendukung sasaran strategis V terkait Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sesuai program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan, penyalagunaan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba pada pasal 4 ayat 2 dilakukan sosialisasi berupa :

- Seminar
- Lokakarya
- Workshop
- Kegiatan keagamaan

- e. penyuluhan
- f. pagelaran seni
- g. dll

dan Peraturan Bersama Menteri agama dan meteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat menjelaskan pada Bab III pasal 8 ayat 1 berbunyi FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. Dan pada pasal 9 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

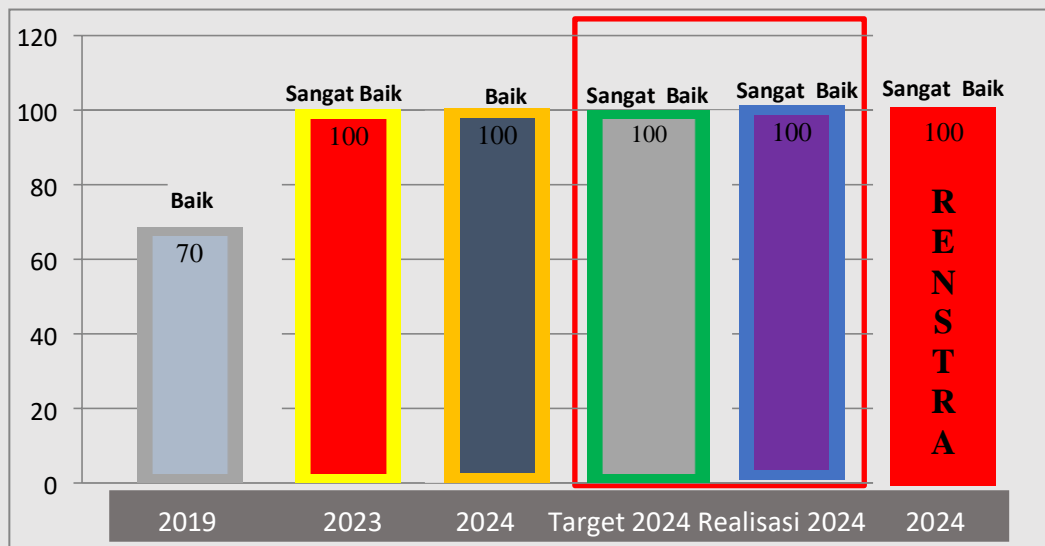
Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran V untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi :

1. Kegiatan Diseminasi Gerakan Moderasi Beragama Pada Komunitas Pegiat Literasi dengan tujuan Untuk menanamkan nilai-nilai moderat dalam beragama dan saling menghargai, literasi moderasi beragama dapat diwujudkan melalui membaca dan menulis kegiatan ini Prakarsai oleh Balai Litbang Keagamaan Makassar setelah menerima Kunjungan koordinasi Badan kesbangpol untuk dapat memadukan kegiatan BLAM dan Pemda Polman melalui Badan Kesbangpol
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber daya pembangunan Desa/Kelurahan, kegiatan ini diinisiasi oleh BNNK polewali Mandar kerjasama Badan Kesbangpol Polewali Mandar.

PREDIKAT : SANGAT BAIK

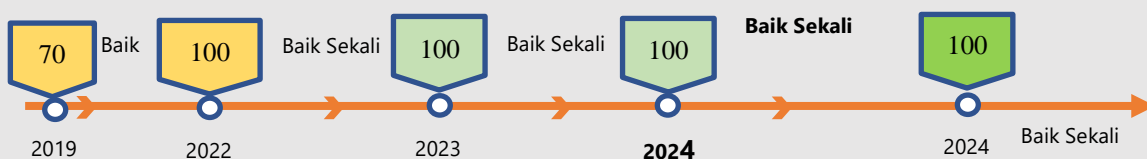
Chart 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024
Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Bidang Bina Ideologi Wasbang, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekosbud , Januari 2024

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019,

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Forum Kerukunan Umat Beragama dan P4GN
- Telah terbentuknya Pengurus FKUB Masa Khidmat 2023-2028
- Sosialisasi terkait Peningkatan Toleransi kerukunan umat beragama dan sosialisasi P4GN dan koordinasi dengan BNNK dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba sudah gencar dilakukan ke semua kalangan

Faktor Penghambat :

- Sudah ada Perda terkait P4GN Tapi belum disosialisasikan
- Belum terbentuknya Tim terpadu P4GN
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol senantiasa mengajak Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan stakeholder terkait untuk melakukan dialog dalam menyikapi persoalan di daerah dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama dan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan cegah dini terhadap potensi munculnya konflik keagamaan dan potensi peredaran narkotika dimasyarakat
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan pemberdayaan dan Pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap ketahanan ekonomi sosial dan budaya sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 4.257.600,-	Rp. 4.257.600,-	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 4.257.600,-	Rp. 4.257.600,-	100

Gambar 3.6. Kegiatan Diseminasi Gerakan Moderasi Beragama Bagi Komunitas Pegiat Literasi dan Monev Ketahanan Keluarga anti Narkoba



**Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Perangkat Daerah**



Predikat SAKIP perangkat daerah

Target : A

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Target : 100%

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Target : Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran Strategis 6, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	77,85
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100 %	100 %	100 %
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100 %

Indikator Kinerja I : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

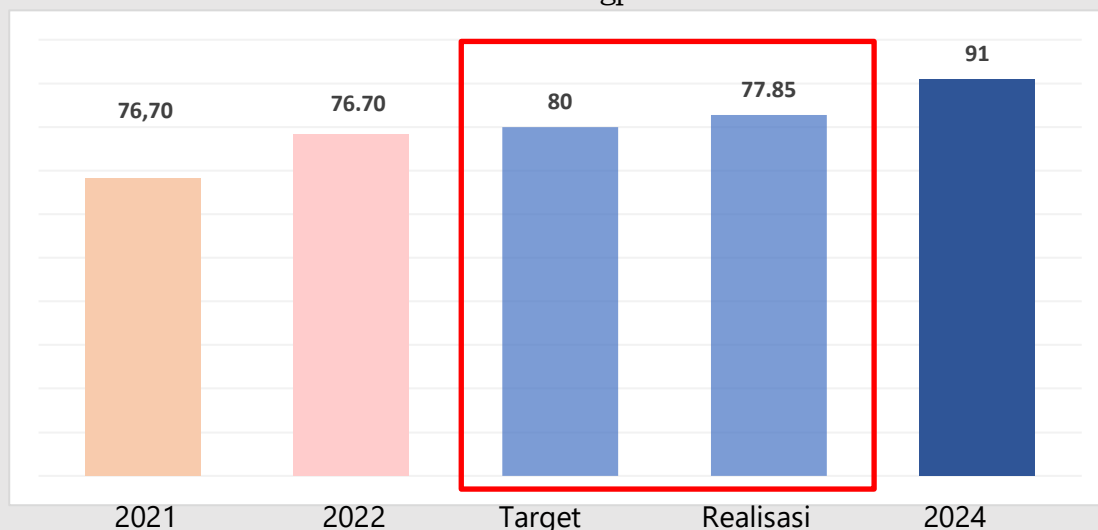
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan

Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

Komponen SAKIP	2021	2022	2023
Perencanaan Kinerja	28,30	28,30	28,50
Pengukuran Kinerja	22,50	22,50	22,19
Pelaporan Kinerja	9,70	9,70	9,96
Evaluasi Internal	5,20	5,20	5,20
Capaian Kinerja	11	11	12
Nilai	76,70	76,70	77,85
Predikat	BB	BB	BB

Adapun capaian Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat digambarkan melalui Chart berikut ini :

Chart 3.6
Perkembangan Implementasi SAKIP
Badan Kesbangpol Tahun 2021-2023



**Capaian Kinerja
target-realisasi
2021**

$$= \frac{76,70}{80} \quad 95,87$$

**Capaian Kinerja
2021-2023,
Meningkat :
1,15 POINT**

**Capaian Kinerja
target Akhir
Renstra**

$$= \frac{77,85}{91} \quad 85,55$$

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari segi Bobot Nilai, walaupun predikat BB pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja semakin membaik.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang : a. Tersedianya aplikasi e-SAKIP	Faktor Penghambat : a. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja
Solusi : a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi	

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pagu	Realisasi	%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.952.145	9.952.145	100
-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.448.144	5.448.144	100
-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.405.233	2.405.233	100
-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.098.768	2.098.768	100

Indikator Kinerja II : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam sejak Tahun 2016-2022 selalu mencapai WTP, akan tetapi pada tahun 2023 Kabupaten Polewali Mandar meraih opini WDP dari BPK Perwakilan Sulbar, maka diharapkan pencapaian untuk tahun anggaran 2024 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Analisis keberhasilan dan kegagalan

Faktor Penunjang : a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Badan Kesbangpol untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah	Faktor Penghambat : a. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan b. Belum optimalnya tertib administrasi aset
Solusi : a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.071.133	1.608.071.133	100
---	----------------------	----------------------	------------

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.603.978.063	1.603.978.063	100
-----------------------------------	---------------	---------------	-----

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.093.070	4.093.070	100
---	-----------	-----------	-----

Indikator Kinerja III : Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semakin membaik. Terdapat 4 (empat) layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, sebagai berikut :

1. Rekomendasi Izin Penelitian
2. Rekomendasi Izin Kegiatan
3. Surat Keterangan Keberadaan Ormas
4. Layanan Partai Politik

Tabel 3.8
Jenis Layanan Publik Non Pelayanan Langsung

No.	Nama Layanan	Waktu Penyelesaian	Bidang Penanggung Jawab
1	Rekomendasi Izin Penelitian	30-60 Menit	Bid. Bina Ideologi pada tahun 2020 sudah ada ASN Kesbangpol yang berada di DINAS PM PTSP untuk memberikan layanan kepada Mahasiswa
2	Rekomendasi Izin Kegiatan	30-60 menit	Bid. Bina Ideologi
3	Pelayanan SKT ormas dan Surat keterangan Keberadaan Ormas	30-60 Menit	Bid. Ormas
4.	Layanan Partai Politik	30-60 Menit	Bid. Poldagri

Mencermati Tabel terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholders atas 4 jenis layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 mencapai indeks diatas 91,65 % atau predikat kinerja layanan ‘Sangat Baik’. Sebagai pengelola data sectoral kategori C Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2024 ini meningkat dari Tahun Ketahun yang masih berada di kategori Baik, Tingginya motivasi kerja pegawai serta meningkatnya perhatian Perangkat Daerah terhadap layanan yang disediakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , turut berpengaruh terhadap capaian kinerja kepuasan pelayanan publik. Tahun 2024, capaian kinerja kepuasan layanan publik meningkat sangat pesat. Adanya dukungan perkembangan teknologi informasi secara nyata sangat berpengaruh terhadap capaian ini. Selanjutnya, capaian tahun 2024 ini menunjukkan sudah tercapai 91,65 % dari target jangka menengah yang

tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang : <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya motivasi kerja Pegawai b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi c. Meningkatnya perhatian Masyarakat, Ormas dan Partai Politik terhadap layanan yang disediakan Badan Kesbangpol 	Faktor Penghambat : <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak b. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan
Solusi : <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja 	

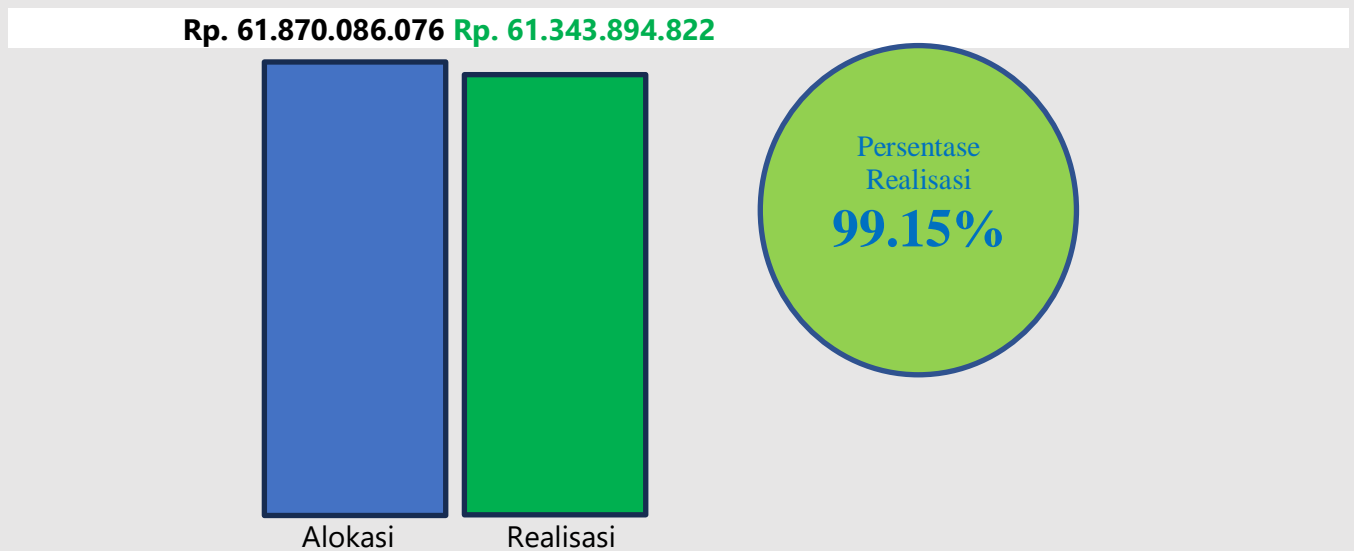
B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Badan Kesbangpol, dapat disajikan sebagai berikut:

Chart 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024

Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024, maka dapat diamati melalui Tabel berikut :



Melihat chart diatas melihat kondisi alokasi anggaran dan realisasi sudah mencapai target dengan persentase 99,15 %



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Badan Tahun 2024. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Namun ada beberapa yang tidak terealisasi akibat pencairan anggaran tidak realisasi dan ada kegiatan tidak dilaksanakan akibat refocusing tapi diupayakan dilakukan dengan bermitra Instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan kesbangpol namun secara kinerja sudah dilaksanakan Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Badan hampir mencapai 100 % serta capaian kinerja keuangan sebesar 99,15 %. Kondisi ini memperlihatkan Badan Kesbangpol berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 0,85%.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

1. Secara umum, agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 yang akan datang dapat ditingkatkan.
2. Agar ditingkatkan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada level Eselon IV atau Level Sub kegiatan , yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



Kepala Badan Kesbangpol

Hj. Asliah Rahim, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680428 198910 2 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr. Ratulangi No. 29 Polewali, Kode Pos 91314

Telepon. 0428-21493 Faks. 0428-21493

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hj. ASLIAH RAHIM, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : PJ. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Pebruari 2024

Pihak Kedua
PJ. Bupati Polewali Mandar,

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19690319 198811 1 001

Pihak Pertama
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Hj. ASLIAH RAHIM, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680428 198910 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat 'Baik	Sangat 'Baik
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat 'Baik	Sangat 'Baik
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat 'Baik	Sangat 'Baik
6	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat 'Baik	Sangat 'Baik

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 2,065,669,966	APBD
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 814,304,870	APBD
3	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 54,468,074,754	APBD
4	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 65,633,943	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
5	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 21,582,153	APBD
6	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 23,682,157	APBD
JUMLAH		Rp 57,458,947,843	APBD

Polewali, 23 Pebruari 2024

Pihak Kedua
PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,



Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19690319 198811 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK,



ILHAM RAHIM, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680428 198910 2 001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan Masyarakat di Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, mengisyaratkan pentingnya mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan,

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Yang berperan Aktif dalam pemahaman Wawasan Kebangsaan	Dengan adanya sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan yang lebih intensi akan lebih menanamkan dalam hati sanubari terhadap empat pilar kebangsaan sebagai salah satu pondasi dalam berbangsa dan bernegara	$\frac{\text{Jumlah yang mengikuti pemahaman kebangsaan}}{\text{Jumlah target yang direncanakan dalam tahun itu}} \times 100$	Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang memuat antara lain : meliputi 4 pilar kebangsaan yaitu : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan ekonomi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sehingga terciptanya iklim yang kondusif dalam menjaga stabilitas didaerah Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bersama Menteri agama dan meteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dan Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Forum toleransi intra antar umat Bergama dan yang difasilitasi dalam pencegahan penyalagunaan Narkotika dan minuman keras	Dengan adanya forum toleransi antar umat beragama dan fasilitasi P4GN akan meningkatkan ketahanan di bidang sosial budaya di mana salah satu pilar keutuhan bangsa adalah adanya ketahanan ekonomi sosial dan budaya	$\frac{\text{Jumlah Yang dibina dalam peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya}}{\text{Jumlah target dalam tahun berjalan}} \times 100$	Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang mengukur antarlain kinerja indikator terhadap pemberdayaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dalam bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan dan penyalagunaan narkoba

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Politik dalam Negeri di daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain **Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** dan **Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik**

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Masyarakat yang berperan Aktif dalam Pendidikan Politik	Dengan adanya sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat secara kontinyu akan meningkat pemahaman masyarakat dalam Pendidikan politik dan berdampak pada peningkatan masyarakat dalam untuk ikut berpartisipasi dalam setiap momen pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan politik}}{\text{Jumlah yang ditargetkan dalam 1 tahun}} \times 100$	Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pemahaman Poliitk Masyarakat	Baik	Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang mengukur antarlain hakkebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu,hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak perlindungan dari perlakuan diskriminatif dll serta kewajiban untuk taat pada hukum yang berlaku,menghormati HAM,menjunjung tinggi Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, kewajiban ikut serta dalam Pemilu dll.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlunya adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini dengan dibentuknya Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di daerah dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Koordinasi Pengananan Konflik Sosial.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Potensi konflik yang terdeteksi dan tertangani	Dengan adanya Tim Kewaspadaan dini Pemerintah daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang telah terbentuk akan berdampak baik dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan didaerah sekaligus terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik yang terdeteksi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik yang terjadi dalam satu tahun}} \times 100$	Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang mengukur antarlain adalah capaian yang di hasilkan dalam mengukur indicator potensi konflik yang terdeteksi dan tertangani

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan disamping sebagai wahana berkumpul bagi anggota juga harus senantiasa membawa kiprahnya ditengah-tengah pergaulan umat manusia yang nyata-nyata dirasakan manfaatnya. Untuk itu kehadirannya sangat strategi dalam mendorong pembangunan di wilayahnya untuk bersama-sama membangun kehidupan yang kokoh, meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemartabatan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi dan akses-akses lainnya. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 yang merupakan mitra Pemerintah .

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Ormas yang di bina dan diawasi	Adanya kegiatan pembinaan ormas berupa peningkatan kapasitas serta terbentuknya tim terpadu ormas dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan ormas	$\frac{\text{Jumlah ormas yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Ormas yang terdaftar}} \times 100$	Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang mengukur antarlain adalah angka yang digunakan mengukur kinerja indikator terhadap pemberdayaan dan pembinaan serta monitoring organisasi masyarakat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN																	
2	RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR																	
3	PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024																	
4																		
5																		
6	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (%)	Ket			
7					I	II	III	IV										
8																		
9																		
10	1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		11
11				Kinerja Jumlah	Rupiah	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
12	A	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu, Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat,Persentase tertib ketatausahaan kantor waktu	100%,100%,90 %	1,976,020,998		334,244,351	50%	686,739,726		464,905,077	468,869,639		1,954,758,793		98.92		
13	1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	9,952,145		-	2 Lap	2,098,768		3,348,200	4,505,177		9,952,145		100.00		
14	1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	5,448,144		-	-	1 Dok	3,348,200		2,099,944	1 Dok	5,448,144	100	100.00		
15	2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2,405,233		-	-	-	1Dok	2,405,233	1 Dok	2,405,233	100	100.00			
16	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2,098,768		-	2 Lap	2,098,768		-	-	2 Lap	2,098,768	100	100.00		
17	2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	1,608,071,133		311,144,938	57.143	591,240,141		352,104,900	353,581,154		1,608,071,133	52.14	100.00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
18	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 OB	1,603,978,063		311,144,938	144 OB	589,204,071	54 OB	352,104,900	54 OB	351,524,154	252 OB	1,603,978,063	100	100.00	
19	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,093,070		-	1 Lap	2,036,070		-		2,057,000	1 Lap	4,093,070	100	100.00	
20	3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Adminisdrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6,650,000		-	100	6,650,000		-		-		6,650,000	100	100.00	
21	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	19 Paket	6,650,000		-	19 Paket	6,650,000		-		-	19 Paket	6,650,000	100	100	
22	4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	100%	145,966,399		5,782,600	#DIV/0!	17,322,690		58,381,660		56,958,444		138,445,394		94.85	
23	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,718,000		-	-	1,718,000		-		-	1 Paket	1,718,000	100	100.00	
24	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24,852,000		-	-	6,528,000		-		13,824,000	2 Paket	20,352,000	100	81.89	
25	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,631,569		-	-	2,532,870		-		10,098,699	2 Paket	12,631,569	100	80.81	
26	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	3,240,000		-	-	1,080,000		-		2,160,000	2 Dok	3,240,000	100	100.00	
27	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,927,630		-	-	5,463,820		-		5,462,805	1 Paket	10,926,625	100	99.99	
28	6	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	89,597,200	3 Laporan	5,782,600	-	-	50 Lap	58,381,660	17 Lap	25,412,940	70 Lap	89,577,200	100	99.98	
29	5	Kegiatan : Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	14,860,680		-	100	14,860,680		-		-		14,860,680	100	100.00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
30	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	14,860,680			47 Unit	14,860,680		-		-		14,860,680	100	100.00	
31	6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100%	154,057,841		17,316,813		32,615,779		51,070,317		39,669,538		140,672,447		91.31	
32	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	30,431,291		7,116,813	-	2,015,779		10,270,317		7,842,988	2 Lap	27,245,897	100	89.53	
33	2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	123,626,550		10,200,000	-	30,600,000		40,800,000		31,826,550	1 Lap	113,426,550	92	91.75	
34	7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMĐ	100%	36,462,800		-		21,951,668		-		14,155,326		36,106,994		99.02	
35	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	20,737,800		-	-	9,800,000		-		10,582,000	3 Unit	20,382,000	60	98.28	
36	2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	15,725,000		-	8 Unit	12,151,668		-		3,573,326	8 Unit	15,724,994	100	100.00	
37	B	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Yang Tertangani	100 Persen	48,080,250		-		-		15,255,900		32,819,350		48,075,250		0.00	
38	1	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis	1 Dok	48,080,250		-		-		15,255,900		32,819,350		48,075,250		0.00	

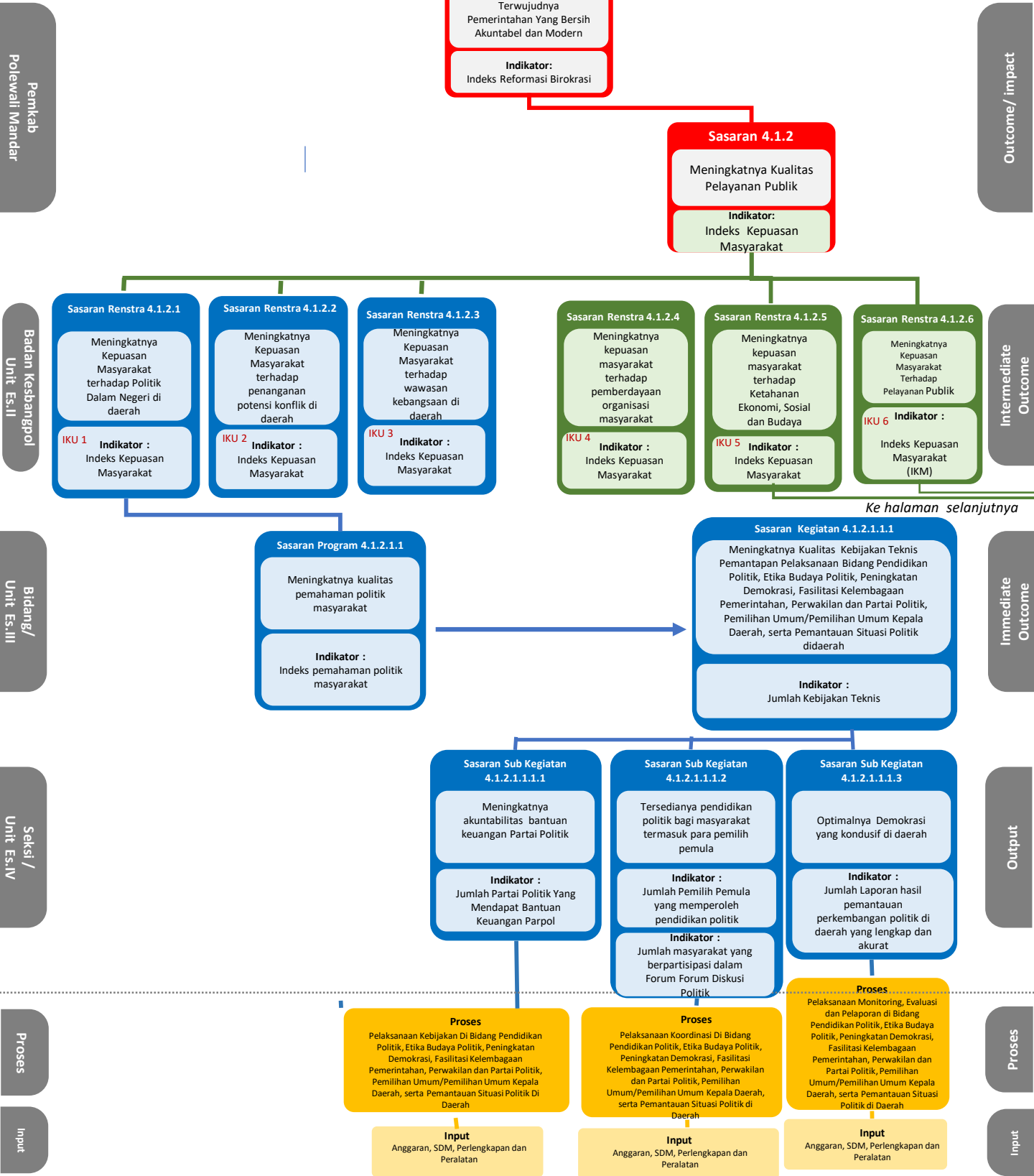
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
39	1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	48,080,250		-		-	2 Lap	15,255,900	2 Lap	32,819,350	4 Lap	48,075,250	100	99.99	
40	C	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	18 Persen	9,957,283		-		-		7,120,000		2,762,153		9,882,153		99.25	
41	1	Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis	1 Dok	9,957,283		-		-		7,120,000		2,762,153		9,882,153		99.25	
42	1	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 orang	9,957,283		-				7,120,000		2,762,153		9,882,153	100	99.2	
43	D	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Baik	818,000,555		22,691,220		311,253,770		466,055,565		18,000,000		818,000,555		100.00	
44	1	Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis	1 Dok	818,000,555		22,691,220		311,253,770		466,055,565		18,000,000	1 Dok	818,000,555		100.00	
45	1	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijkan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 orang	-		-								-		0.0	
46	2	Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	75 orang	818,000,555		22,691,220		311,253,770	75 Org	466,055,565		18,000,000	75 Org	818,000,555	100	100.0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
47	E	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Forum yang di Bina dan di kembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 Persen	4,257,600		-		-		-		4,257,600		4,257,600		0.00	
48	1	Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis	1 Dok	4,257,600		-		-		-		4,257,600		4,257,600		0.00	
49	1	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	0 orang	4,257,600		-						4,257,600		4,257,600	100	100.0	
50	F	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Pemahaman Politik Masyarakat	Baik	59,013,769,390		20,008,312,113		3,200,000,000		33,922,834,300		1,377,774,058		58,508,920,471		33.90	
51	1	Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis	1 Dok	59,013,769,390		20,008,312,113		3,200,000,000		33,922,834,300		1,377,774,058	1 Dok	58,508,920,471		99.14	
52	1	Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang	22 Dok	974,647,775					11 Dok	409,850,640		60,250,037	11 Dok	470,100,677	50	48.23	

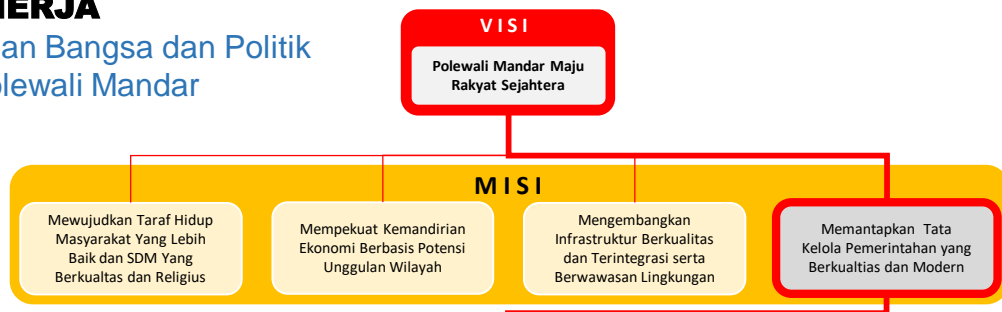
[illegible]

POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



Terwujudnya
Pemerintahan Yang Bersih
Akuntabel dan Modern

Indikator:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:
Indeks Kepuasan
Masyarakat

Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap Politik
Dalam Negeri di
daerah

IKU 1 **Indikator :**
Indeks Kepuasan
Masyarakat

Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
penanganan
potensi konflik di
daerah

IKU 2 Indikator :
Indeks Kepuasan
Masyarakat

Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
wawasan
kebangsaan d
daerah

IKU 3
Indikator :
Indeks Kepuasan
Masyarakat

Meningkatny
kepuasan
masyarakat
terhadap
pemberdayaa
organisasi
masyarakat

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan
kepuasan
masyarakat
terhadap
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
dan Budaya

IKU 5 Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatny
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Pub

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya kualitas

konflik

Indikator :
Persentase potensi konflik yang tertangani

Meningkatnya kualitas kewaspadaan Nasional

Jumlah Kebijakan Teknis

Optimalnya kewaspadaan

daerah

Indikator :
Jumlah Laporan

© 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Optimalnya peran aktif
Forum Koordinasi

Kabupaten / Kota

 University of Twente

Jumlah rekomendasi
Forum Kordinasi Pimpinan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Input
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota
(Forkopimda)

Input
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Intermediate Outcome

Immediate Outcome

Output

Proses

Pembabak
Polewali Mandar

Unit Es.II

**Bidang/
Unit Es.III**

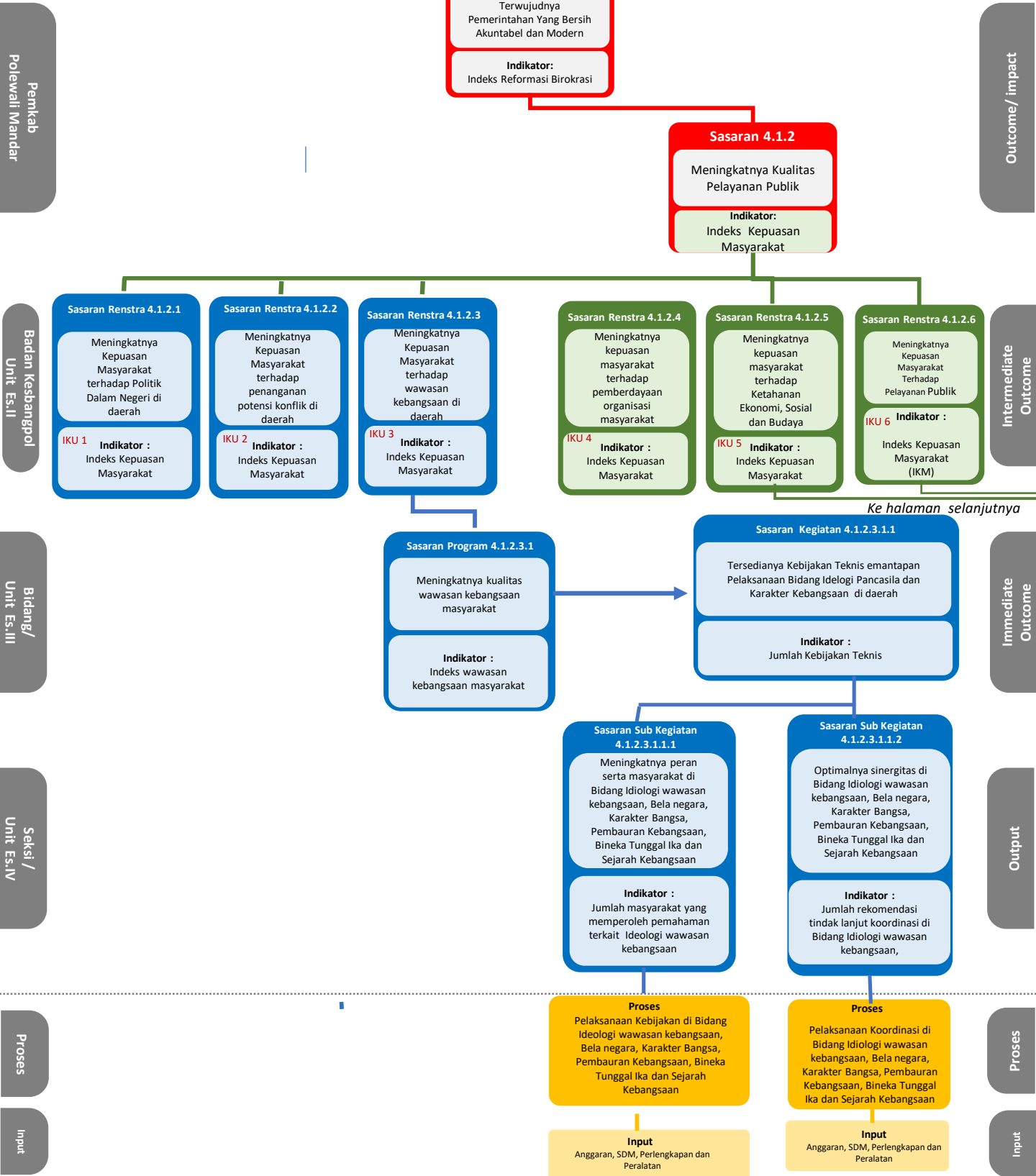
**Seksi /
Unit Es.IV**

Proses

Input

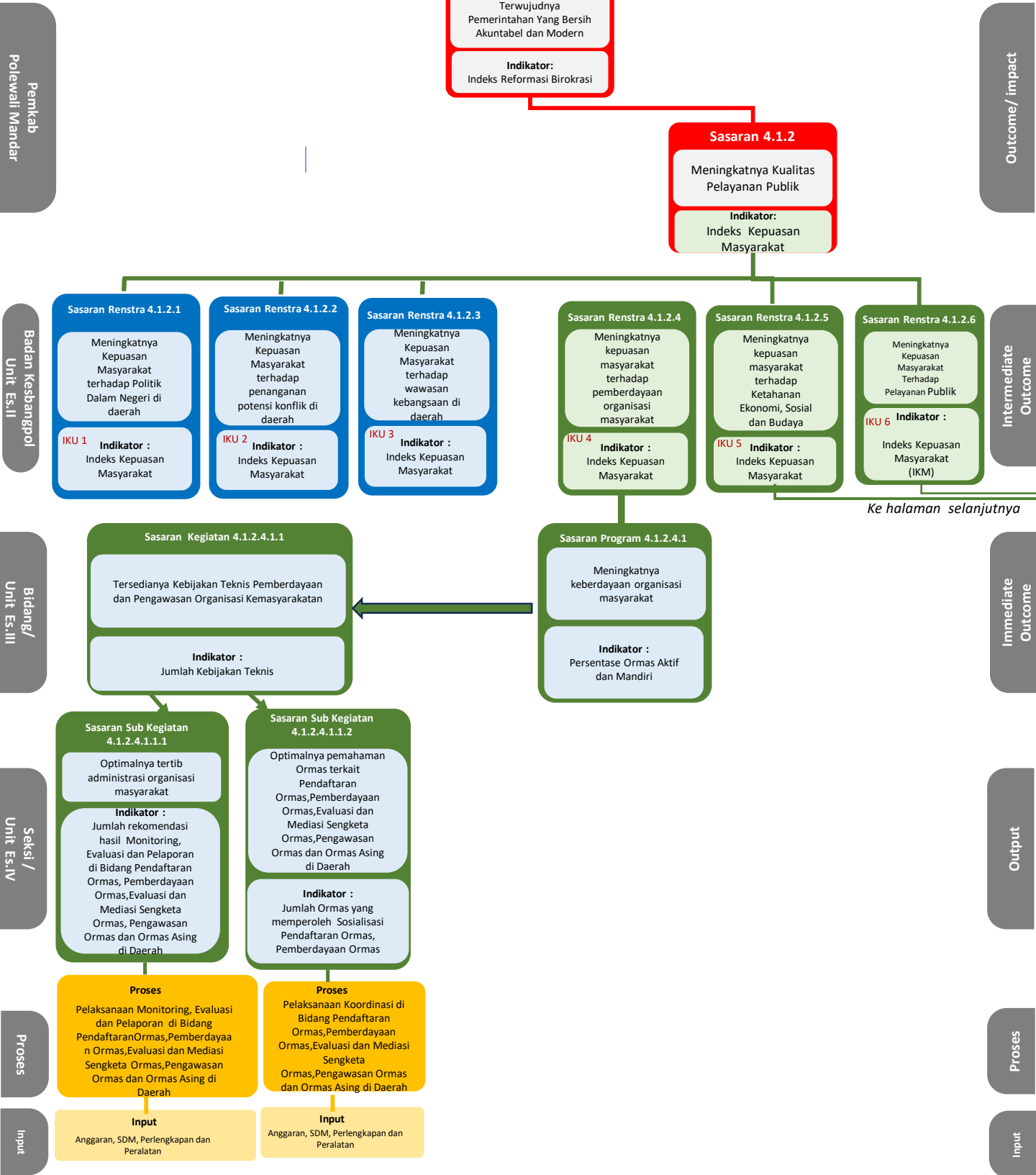
POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



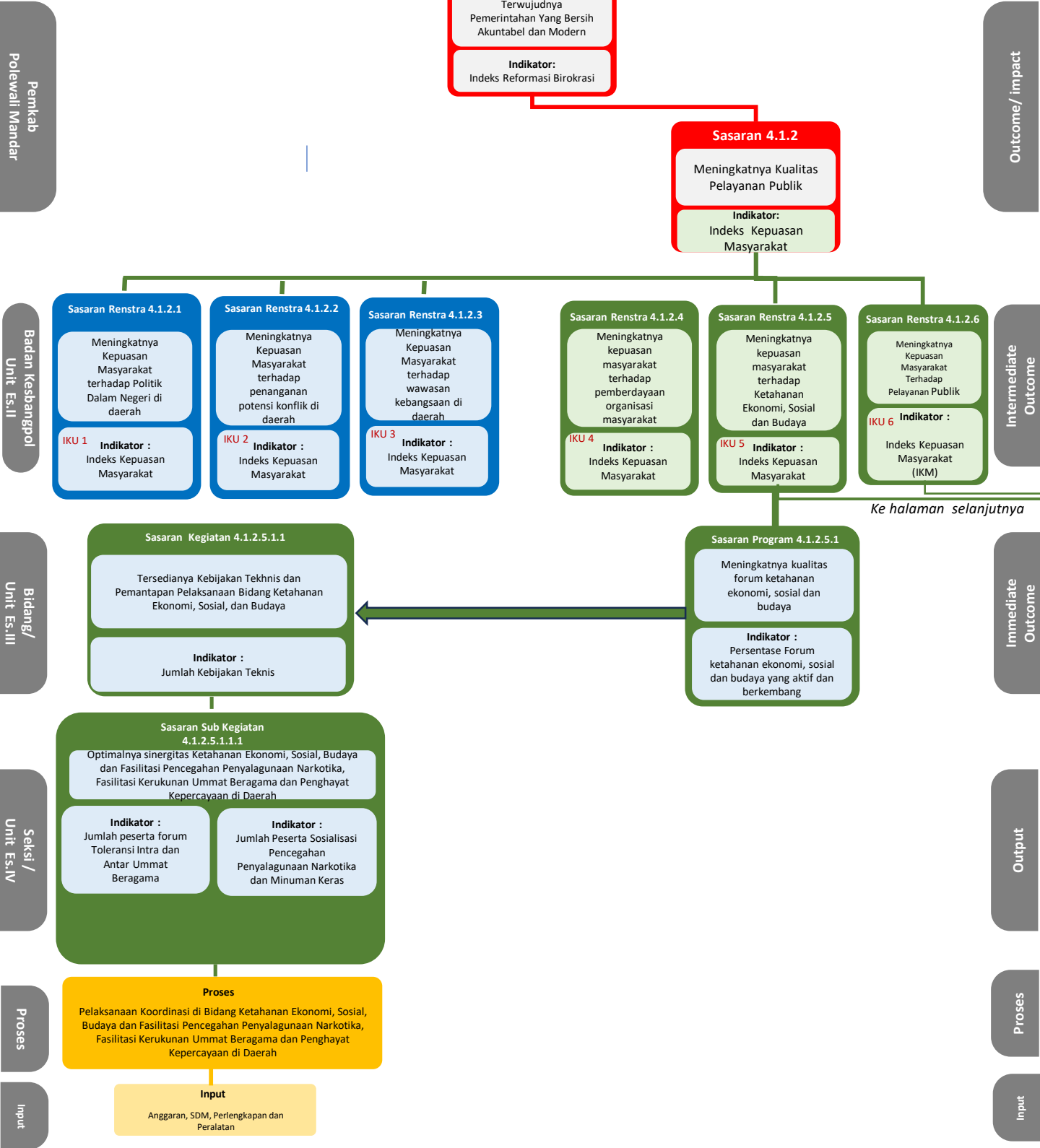
POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



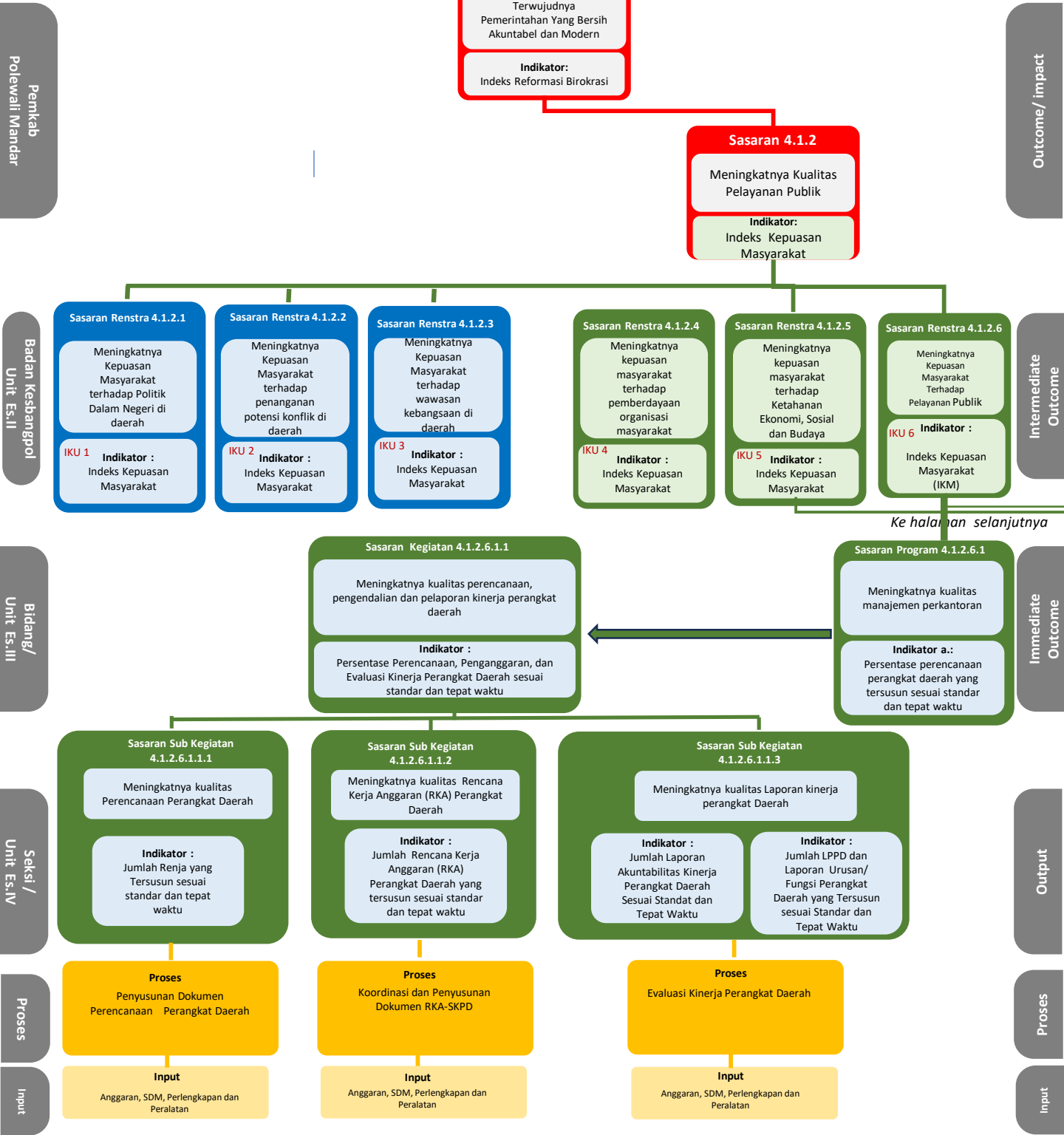
POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



Pemkab
Polewali Mandar

Outcome/ impact

Badan Kesbangpol
Unit Es.II

Intermediate Outcome

Bidang/
Unit Es.III

Immediate Outcome

Seksi /
Unit Es.IV

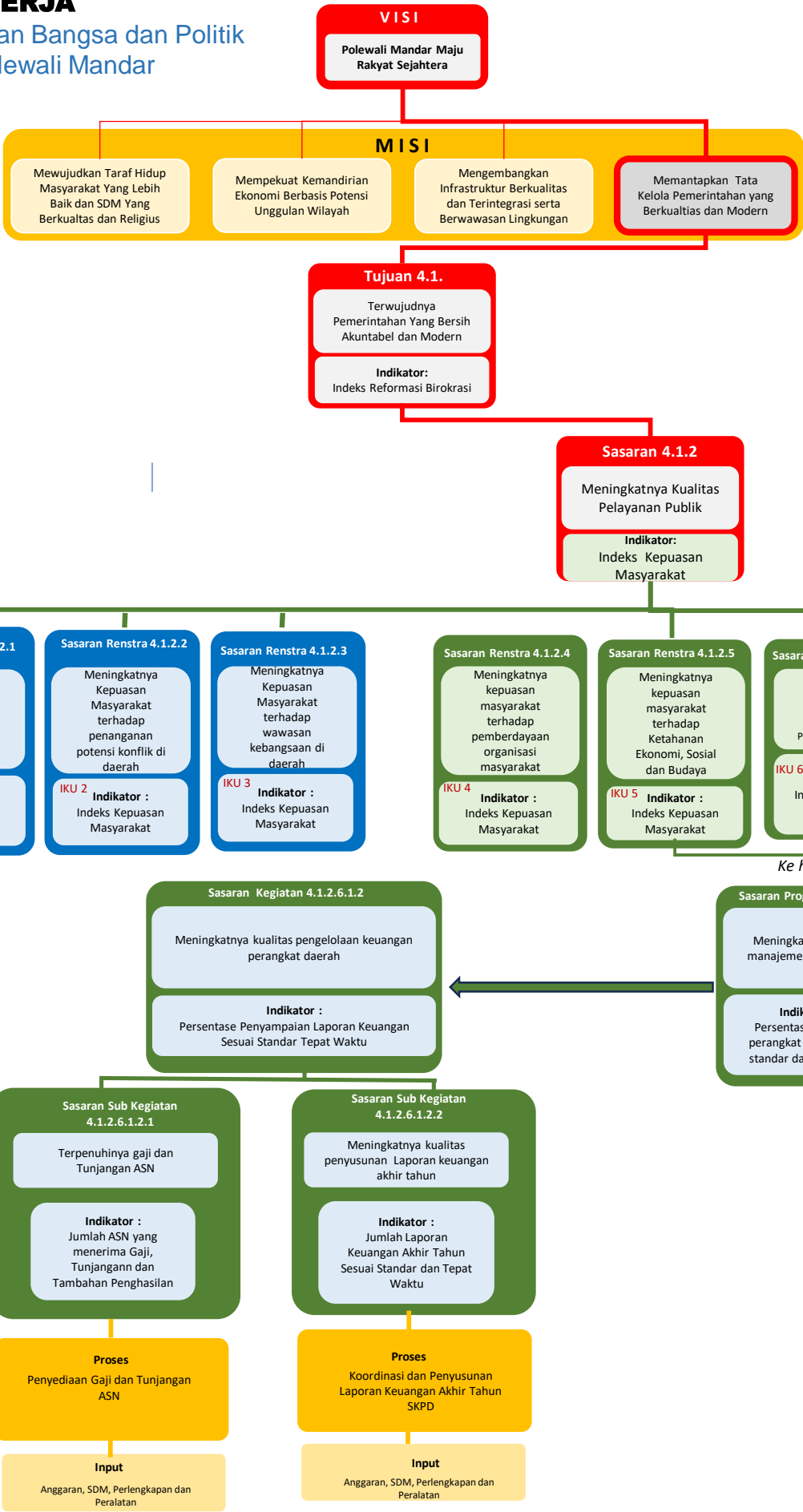
Output

Proses

Proses

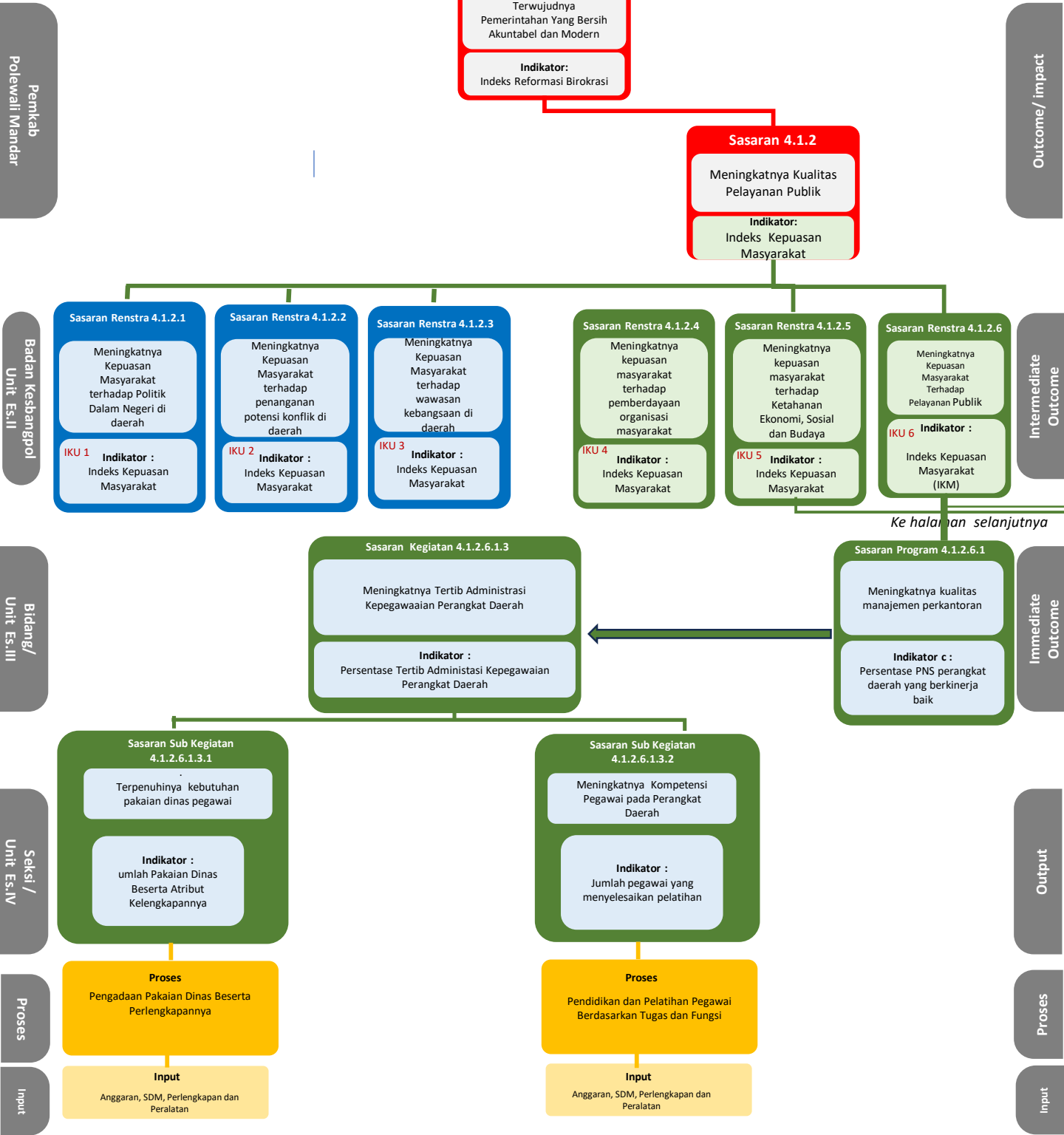
Input

Input



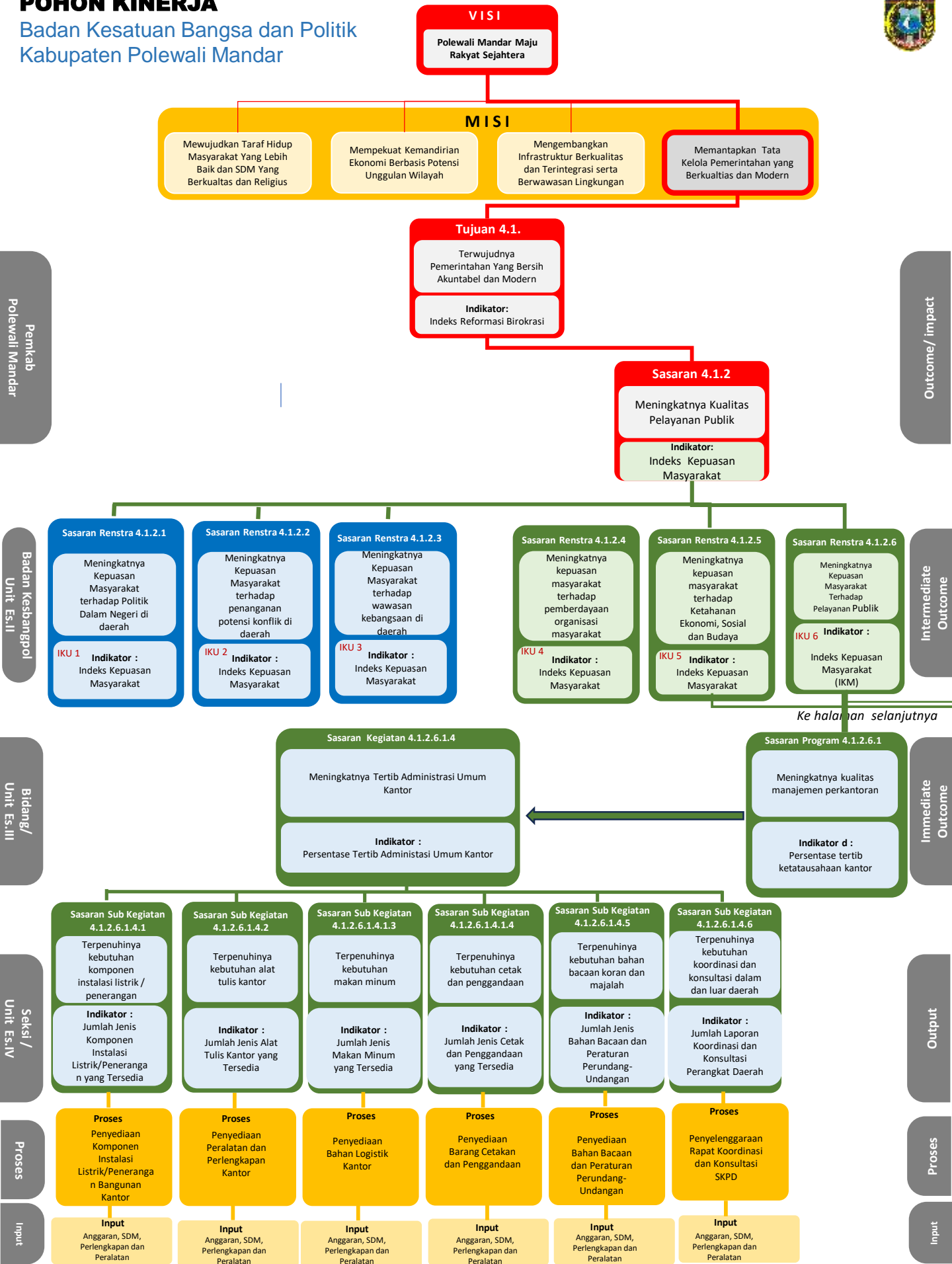
POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



Pemkab
Polewali Mandar

Outcome/ impact

Badan Kesbangpol
Unit Es.II

Intermediate Outcome

Bidang/
Unit Es.III

Immediate Outcome

Seksi/
Unit Es.IV

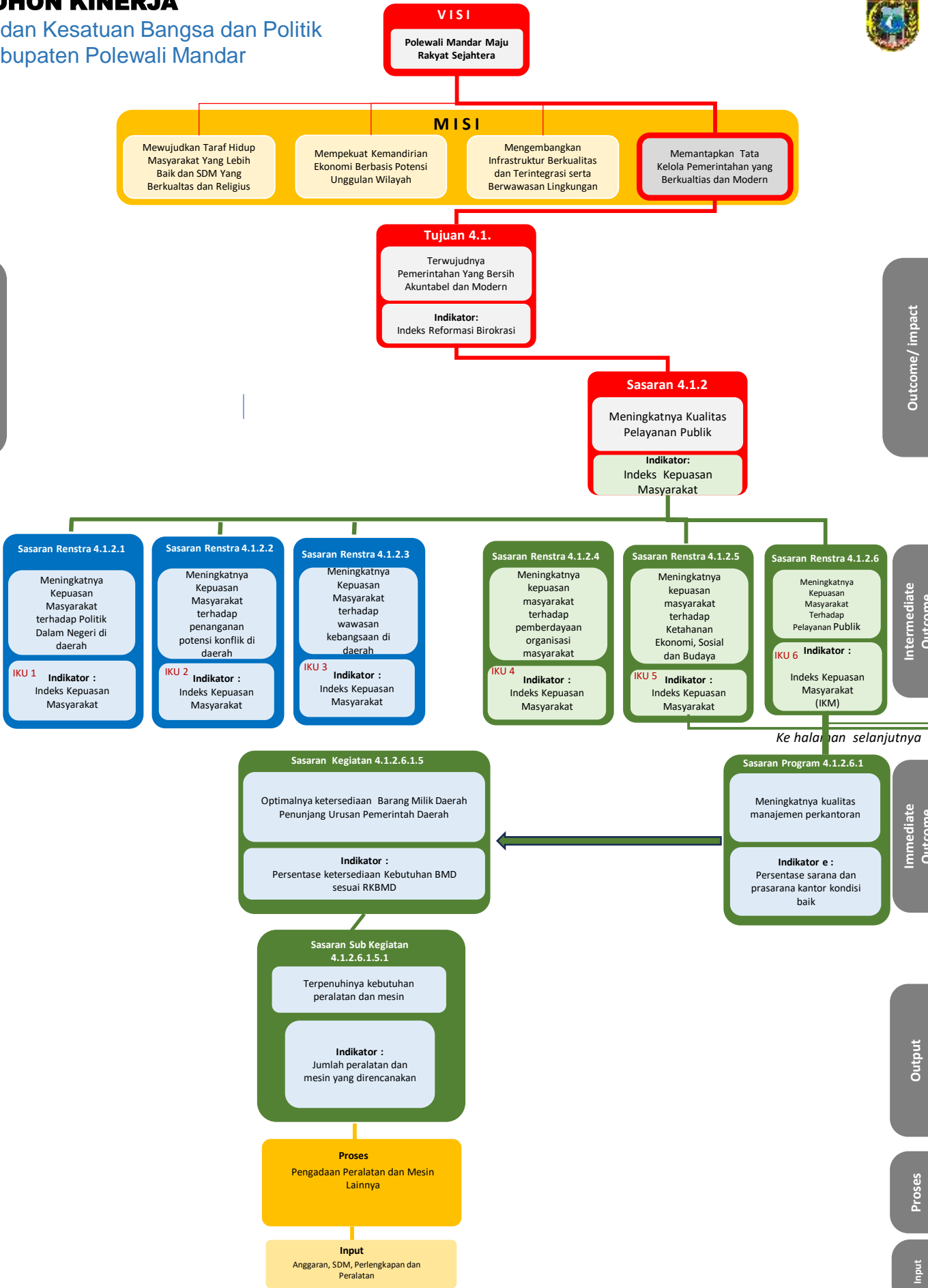
Output

Proses

Proses

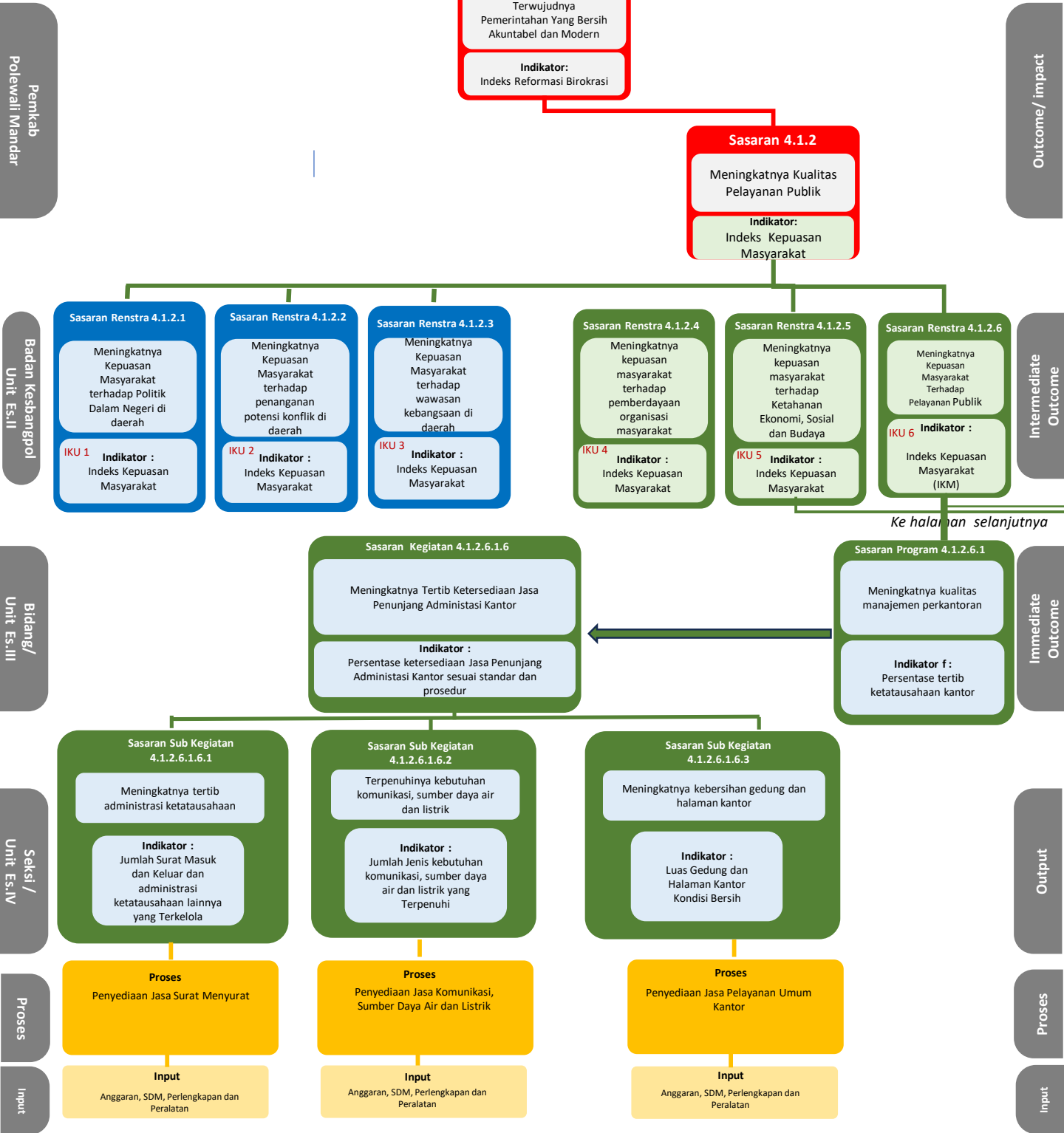
Input

Input



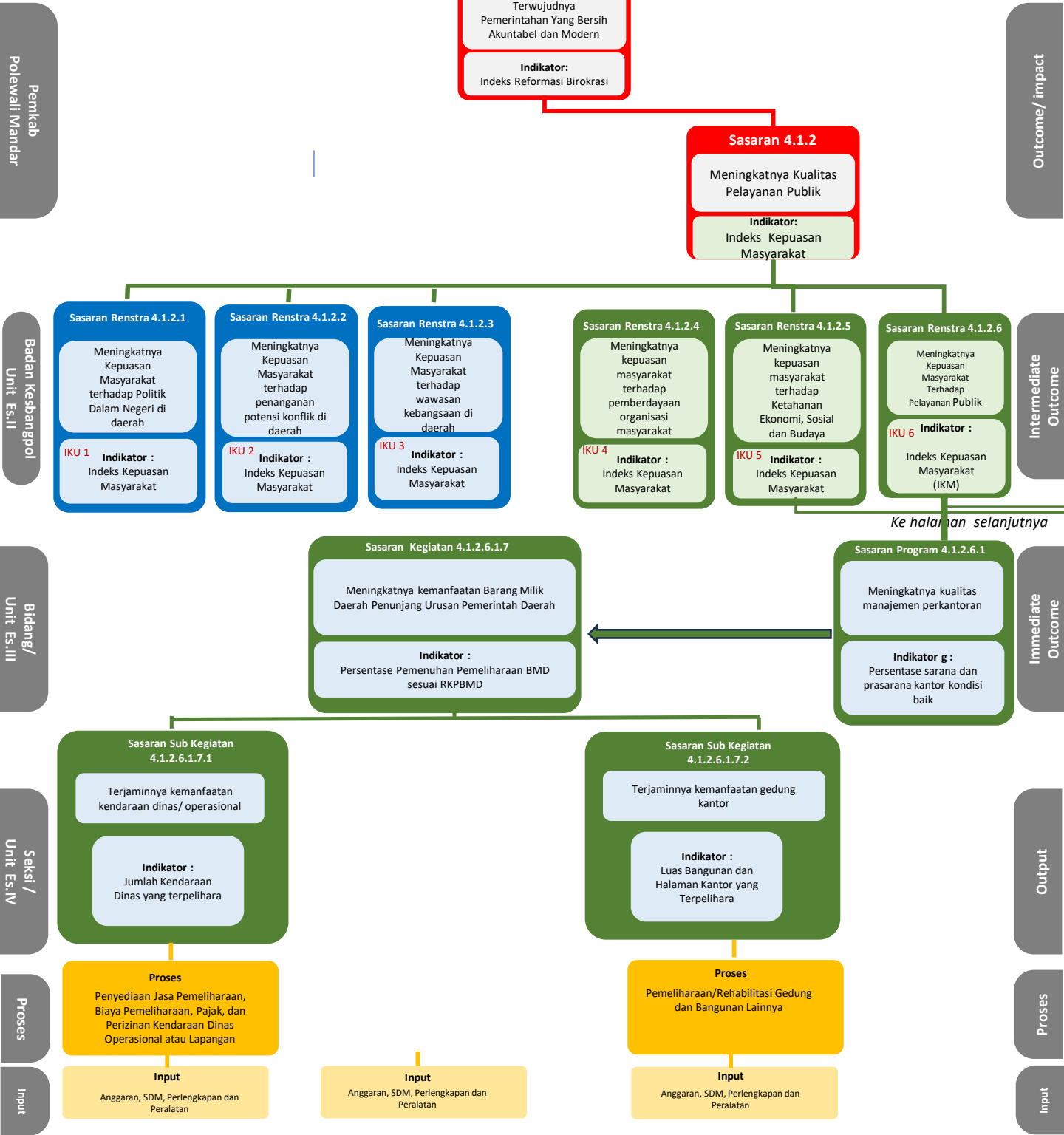
POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jl. Pameran Link. Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali
Kabupaten Polewali Mandar, Kode Pos 91314

Email : inspektorat@polmankab.go.id Website: Inspektorat.Polman.go.id

Polewali, 10 Juni 2024

Nomor : 047.20/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD
Tahun 2023

Kepada

Yth. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tujuan:
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
 - b. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem AKIP;
 - c. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh nilai **77,85** atau memperoleh predikat rating **“BB”** (Sangat Baik). Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	2023		2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,50	30	28,30
b.	Pengukuran Kinerja	25	22,19	25	22,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,96	15	9,70
d.	Evaluasi Internal	10	5,20	10	5,20
e.	Capaian Kinerja	20	12,00	20	11,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,85	100	76,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memiliki dokumen perencanaan strategis berupa Renstra Tahun 2019-2024 yang telah memuat tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dilevel kabupaten ke level OPD.

Berdasarkan evaluasi, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana Strategis Tahun 2019-2024 yang telah disusun memuat tujuan, sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil dan telah dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan yaitu Renja, RKA, dan DPA. Namun untuk menghasilkan

perencanaan strategis yang lebih baik lagi perlu dilakukan monitoring target jangka menengah setiap tahun berjalan dan melakukan revidi secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.

- 2) Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.
- 3) Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan perlu dilakukan lebih optimal lagi

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja dengan targetnya dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV. Selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Pelaporan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Sehingga masih perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran yang berorientasi outcome hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan.

- 2) Laporan kinerja belum menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
- 3) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian-capaian kinerja outcome atau output penting dan belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga Laporan Kinerja tidak dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta tidak dapat digunakan untuk perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.
- 4) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran.
- 5) Laporan kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran atau kinerja.
- 6) Laporan kinerja belum menyajikan informasi kinerja yang dapat diandalkan.
- 7) Informasi kinerja yang termuat dalam laporan kinerja belum dapat digunakan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

d. Evaluasi Internal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum melakukan evaluasi internal secara berkala untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, hanya melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran, sebatas memberikan informasi capaian hasil-hasil program belum memberikan informasi keberhasilan atau ketidak berhasilan program dan tindak lanjut untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga hasil evaluasi tidak dapat digunakan untuk perbaikan manajemen kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

e. Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui dari kinerja output dan outcome yang dilaporkan. Berdasarkan hasil output dan outcome menunjukkan bahwa target yang dapat dicapai hasilnya telah memadai namun masih perlu ditingkatkan lagi capaian-capaian indikator output dan outcome yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran agar lebih berkualitas dan handal.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas serta dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP, maka kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar direkomendasikan agar melakukan upaya perbaikan untuk setiap komponen, sub-komponen AKIP pada Tahun 2024 dengan uraian secara umum sebagai berikut :
- a. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen Rencana Strategis untuk mengetahui apakah Renstra yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi saat ini dan jika ada kekeliruan dapat segera dilakukan perbaikan yang hasilnya dapat menunjukkan kondisi yang lebih baik untuk mendukung terciptanya inovasi kedepan;
 - b. Melakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran serta program/kegiatan dan anggarannya untuk pencapaian sasaran strategis.
 - c. Melakukan pengukuran kinerja secara tertib dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja secara optimal dengan melakukan perbaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
 - d. Melakukkann evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi secara rutin minimal per-triwulan untuk mengetahui informasi tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan rencana atau agenda yang telah dibuat, sehingga terdapat alternatif yang dapat diberikan dan Menguatkan komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
 - e. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran yang berorientasi outcome bukan hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian-capaian kinerja outcome atau output penting, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antar realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi

tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan strategi (program/kegiatan) yang diperlukan.

- f. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
- h. Memperhatikan dan menindak lanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Pimpinan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


INSPEKTUR KABUPATEN,
H.AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 20000 1 084

Rapat Evaluasi Internal Badan Kesbangpol



**CAPAIAN KINERJA MONEV RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2024**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						K	Rp.	K	Rp.				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI (BADAN KESBANGPOL)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah: Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM)	Predikat		1,976,020,998		1,954,758,793	98.92	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	9,952,145	100	9,952,145	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	1	5,448,144	1	5,448,144	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,405,233	1	2,405,233	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2,098,768	2	2,098,768	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persen		1,608,071,133		1,608,071,133	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	18	1,603,978,063	22	1,603,978,063	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4,093,070	1	4,093,070	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Adminisdtrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	6,650,000	100	6,650,000	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	19	6,650,000	19	6,650,000	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	Persen	100	145,966,399	100	138,445,394	94.85	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,718,000	1	1,718,000	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						K	Rp.	K	Rp.				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Paket	2	24,852,000	2	20,352,000	81.89	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	15,631,569	2	12,631,569	80.81	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	3,240,000	2	3,240,000	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	10,927,630	1	10,926,625	99.99	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	89,597,200	70	89,577,200	99.98	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	Persen	100	14,860,680	100	14,860,680	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	47	14,860,680	47	14,860,680	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	Persen	100	154,057,841	100	140,672,447	91.31	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	30,431,291	2	27,245,897	89.53	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	123,626,550	1	113,426,550	91.75	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD	Persen	100	36,462,800	99	36,106,994	99.02	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	20,737,800	3	20,382,000	98.28	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	15,725,000	16	15,724,994	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Yang Tertangani	Persen	100	48,080,250	100	48,075,250	99.99	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						K	Rp.	K	Rp.				
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Yang Tertangani	Dokumen	1	48,080,250	1	48,075,250	99.99	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Laporan	4	48,080,250	4	48,075,250	99.99	Rakor Tim Kewaspadaan Dini Daerah Hanya 1 Kali dilaksanakan	Perlu Pelaksanaan Rakor Per Triwulan	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Persen	16	9,957,283	16	9,882,153	99.25	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis	Dokumen	1	9,957,283	1	9,882,153	99.25	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas	30	9,957,283	0	9,882,153	99.25	kegiatan Ini awalnya Dialog Ormas dan Perguruan Tinggi Serta Monev Ormas Akibat Adanya Refocusing Anggaran sehingga kegiatan dialog tidak dilaksanakan yang dilakukan hanya monev ormas	Melakukan Dialog ormas dalam rangka bersinergi dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam mencari solusi demi terciptanya stabilitas Sosial dan Politik di daerah	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Indeks	Baik	818,000,555	Baik	818,000,555	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Dokumen	1	818,000,555	1	818,000,555	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	0	0	0	0	0.00	Kegiatan ini Tidak dilaksanakan Akibat Refocusing Anggaran 2024	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan dan Tokoh Etnis Sangat Penting dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik Tetap Terkendali Di Polewali Mandar	Tidak Ada Rekomendasi

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						K	Rp.	K	Rp.				
			Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	orang	75	818,000,555	75	818,000,555	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Forum yang dibina dan dikembangkan secara ekonomi, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	100	4,257,600	100	4,257,600	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis	Dokumen	0	4,257,600	0	4,257,600	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	0	4,257,600	0	4,257,600	100.00	Kegiatan ini Tidak dilaksanakan Akibat Refocusing Anggaran 2024 Yang realisasi Hanya Perjalanan Dinas Luar Daerah Terkait Kerjasama Dengan Balai Litbang keagamaan Makassar dala Hal Penguatan Moderasi Beragama	Kedepan Perlu Sosialisasi Terkait Moderasi Beragama dan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang P4GN	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Pemahaman Politik Masyarakat	Indeks	Baik	59,013,769,390	Baik	58,508,920,471	99.14	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis	Dokumen	1	59,013,769,390	1	58,508,920,471	99.14	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	22	974,647,775	942,235,100	470,100,677	48.23	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parpol Semster Ke 2 Tidak Cair	Perlu Solusi Apakah akan di anggap Utang Daerah dan Akan di realisasikan di tahun 2025	Tidak Ada Rekomendasi

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						K	Rp.	K	Rp.				
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	35	58,020,924,949	35	58,020,808,868	100.00	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4	18,196,666	4	18,010,926	98.98	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Rekomendasi
	JUMLAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1,976,020,998		1,954,758,793	98.92			
	JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						59,894,065,078		59,389,136,029	99.16			
	JUMLAH						61,870,086,076		61,343,894,822	99.15			

Polewali, 24 Januari 2025

Kepala Badan Kesbangpol



Hj. ASLIAH RAHIM, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680428 198910 2 001

MATRIKS CASCADING KINERJA TAHUN 2021-2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			SATUAN	2021	2022
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan			
VISI : POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA																			
MISI 4: MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN																			
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Indeks Reformasi Birokrasi																Angka	71	75
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)														Predikat	BB	BB
		PERJANJIAN KINERJA BUPATI		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat												Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik
						Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah	Indeks Kepuasan masyarakat										Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik
								Meningkatnya kualitas pemahaman politik masyarakat	Indeks pemahaman politik masyarakat	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Dan							Predikat	Baik	Baik
						PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD					Meningkatnya Kualitas Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan				dokumen		
														Meningkatnya akuntabilitas bantuan keuangan Partai Politik	Jumlah Partai Politik Yang Mendapat Bantuan Keuangan Parpol	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Parpol		
															Jumlah perwakilan partai politik yang memperoleh sosialisasi Tata Kelola Bantuan Keuangan Parpol	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	orang		
														Tersedianya pendidikan politik bagi masyarakat termasuk para pemilih pemula	Jumlah Pemilih Pemula yang memperoleh pendidikan politik	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	pemilih Pemula		
															Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Forum Diskusi Politik	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	orang		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

								Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat	Persentase Ormas Aktif dan Mandiri	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						Persen	13%	16%		
											Tersedianya Kebijakan Teknis Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan			dokumen				
														Optimalnya tertib administrasi organisasi masyarakat	Jumlah rekomendasi hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dokumen			
														Optimalnya pemahaman Ormas terkait Pendaftaran Ormas,Pemberdayaa n Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang memperoleh Sosialisasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Dserah	Ormas			
						Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kepuasan masyarakat										Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	
								Meningkatnya kualitas forum ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Forum ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang aktif dan berkembang	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						Persen	100%	100%		
											Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			dokumen				
														Optimalnya sinergitas Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat	Jumlah peserta forum Toleransi Intra dan Antar Ummat Beragama	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang			
															Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Minuman Keras			orang		